

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama					
1.1	Nilai AKIP Kementerian	Nilai	74,5	74,5	74,5**	100%**
1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	Persentase	92	40%	40%*	100%*
1.3	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	1,7	1,7	1,7**	100%**
1.4	Indeks Perencanaan	Persentase	96	50%	50%*	100%*
1.5	Capaian Prioritas Nasional	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
1.7	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	91	50%	50%*	100%*
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	Persentase	80%	50%	50%*	100%*
2.2	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Persentase	80%	50%	50%*	100%*
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Sektor yang Ditindaklanjuti	Persentase	90%	50%	50%*	100%*
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang Berkualitas					
4.1	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
4.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
4.3	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
4.4	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan	Persentase	100%	60%	60%*	100%*

4.5	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	Persentase	100%	50%	50%*	100%*
V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,57*	119%*
VI	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Persentase	92%	50%	42%*	84%*
6.2	Nilai AKIP Sekretariat	Nilai	79,5	79,5	79,5**	100%**

Keterangan :

(*) : Masih bersifat prediksi serta target dipecah ke triwulanan dan menjadi dasar perhitungan capaian kinerja

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai AKIP Kementerian
2. Indeks Kualitas Kebijakan
3. Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
4. Indeks Perencanaan
5. Capaian Prioritas Nasional
6. Capaian Indikator Kinerja Utama
7. Nilai Kinerja Anggaran

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai AKIP Kementerian

Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga Adalah Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kementerian adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan tahunan. Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu

- a) Perencanaan Kinerja;
- b) Pengukuran Kinerja;
- c) Pelaporan Kinerja; dan
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai AKIP diterima setelah pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahun.

Berikut ini merupakan komponen penilaian yang menjadi rujukan nilai LHE dengan pembobotan sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Sub Komponen 1 (Keberadaan) 20%	Sub Komponen 2 (Kualitas) 30%	Sub Komponen 3 (Pemanfaatan) 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP :

- AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- A (Skor > 80-90); Memuaskan
- BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- B (Skor > 60-70); Baik
- CC (>50-60); Cukup
- C (>30-50); Kurang
- D (0-30); Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Nilai AKIP Kementerian yang terealisasi sebesar 74,5. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga triwulan II 2026, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.1				
1.1. Nilai AKIP Kementerian	Nilai	74,5	74,5**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

**nilai SAKIP dikeluarkan di akhir tahun oleh Kemenpan.

Nilai Akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Pada triwulan II tahun 2026, belum dapat diukur. Penilaian Mandiri berdasarkan aktivitas di setiap triwulan dapat menjadi rujukan dalam mengukur hasil akhir nilai yang akan diperoleh pada akhir tahun 2026. Jika berdasarkan surat Kementerian PAN-RB No.B/71/AA.05/2025 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

menunjukkan bahwa nilai AKIP Kementerian berada pada nilai 74,32 dengan predikat BB. Maka besar kemungkinan target nilai 74,5 di akhir tahun 2026 dapat tercapai. Pada tahun 2025, implementasi akuntabilitas kinerja berada pada level “Sangat Baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 1.1 Nilai LHE AKIP Kementerian

Evaluasi Per Komponen LHE 2025	LHE 2024	LHE 2025	Target 2026
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Catatan : • Perbaikan <i>Critical Success Factor</i>, Formulasi CSF masih bersifat normatif atau generik, yang belum menggambarkan faktor penguangkit yang dapat mempengaruhi keberhasilan Koordinasi lintas KL dan efektifitas sinkronisasi kebijakan • Penyusunan rencana aksi masih berorientasi pada anggaran, bukan pada langkah aksi substantif yang diperlukan. • Pelaksanaan rencana aksi tidak terdistribusi secara merata di sepanjang tahun	23,48	23,79	23,85 (+0,06)
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Catatan : • Optimalisasi kembali monitoring dan evaluasi kinerja pada aplikasi kinerja • Faktor penghambat yang diidentifikasi pada pengukuran kinerja cenderung berulang tanpa ada rencana tindak lanjut yang jelas • Hasil monitoring dan evaluasi laporan yang dilakukan belum dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut	20,22	20,54	20,60 (+0,06)
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Catatan : • Informasi Benchmarking capaian Kementerian dengan capaian Nasional dalam RPJMN maupun Internasional atas indikator yang diukur belum tertuang dalam LAKIP Kementerian dan unit kerja • Pelaporan kinerja yang berkala perlu diperkuat dalam hal progress tindak lanjut dan rencana perbaikan yang telah ditetapkan pada siklus monitoring sebelumnya.	12,91	13,12	13,15 (+0,03)
Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Catatan : • Laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal unit kerja masih lemah kualitasnya, karena belum menyajikan temuan kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki	16,71	16,87	16,90 (+0,03)
Nilai Total Evaluasi AKIP Final	73,32	74,32	74,5

Berdasarkan pada table diatas, LHE tahun 2024 s.d 2025 dan target nilai AKIP 2026 menunjukan tren kenaikan. Catatan evaluasi di setiap komponen kinerja menjadi dasar perbaikan pada tahun 2026. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun rencana perbaikan pada setiap komponen agar dapat tercapai nilai target kenaikan pada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di tahun 2026 yaitu :

- Perencanaan Kinerja
 - Perencanaan kinerja disusun dan dilaporkan secara berkala di setiap level yang dilakukan melalui kinerja.ekon.go.id. Perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis.
 - Rencana aksi (renaksi) tahun 2026 mempertimbangkan langkah aksi substantif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pada level kinerja di atasnya
 - Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan pohon kinerja dengan menambahkan crosscutting dengan K/L terkait dan CSF Tusi Kemenko Perekonomian.
 - Pelaksanaan reviu dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih berorientasi pada outcome, relevan dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mendukung prioritas pembangunan nasional.
 - Penguatan integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja melalui sinkronisasi Renstra, Renja, RKA-K/L, dan Perjanjian Kinerja.
- Pengukuran Kinerja
 - Pengukuran kinerja secara berkala pada setiap level yang dilakukan melalui kinerja.ekon.go.id. Pengukuran tersebut telah dilakukan sesuai dengan formulasi perhitungan yang spesifik yang tertuang dalam manual IKU.
 - Peningkatan kualitas pengukuran kinerja melalui peningkatan kualitas informasi terkait kendala yang dihadapi pada triwulan berjalan dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kinerja di triwulan selanjutnya secara komprehensif, serta menambahkan informasi terkait hasil implementasi upaya yang dilakukan tersebut.
- Pelaporan Kinerja
 - Laporan kinerja disusun dan dilaporkan secara berkala di setiap level yang dilakukan melalui aplikasi kinerja.ekon.go.id. Pelaporan kinerja tersebut disusun sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaporan kinerja telah dilengkapi perbandingan dengan capaian nasional maupun internasional.
 - Peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui integrasi informasi monitoring pelaksanaan langkah korektif yang telah ditentukan di triwulan sebelumnya ke dalam Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi pada Laporan Kinerja Triwulanan.
 - Perbaikan kualitas pelaporan kinerja melalui penyempurnaan substansi Laporan Kinerja (LKj), penguatan analisis capaian indikator kinerja, serta penyajian data dukung yang lebih akurat dan terukur. Selain itu, dilakukan reviu internal secara berkala terhadap

kualitas dokumen pelaporan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman evaluasi SAKIP terbaru.

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Evaluasi AKIP Internal di Kemenko Perekonomian kepada seluruh unit kerja
 - Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui penyempurnaan laporan hasil evaluasi internal agar laporan menyajikan temuan yang kritis yang menggambarkan akar masalah dan area kinerja yang perlu diperbaiki.
 - Memperkuat mekanisme evaluasi internal melalui pelaksanaan evaluasi berkala terhadap komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Hasil evaluasi internal digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan rencana aksi peningkatan implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja.
 - Pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal, termasuk rekomendasi dari Kementerian PANRB dan Inspektorat. Penyusunan matriks tindak lanjut dan timeline penyelesaian dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai AKIP Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Monitoring capaian NKO unit kerja triwulan I	Tertunda/ Digeser	Nilai Kinerja Organisasi merupakan rerata seluruh sasaran strategis. Rerata Sasaran Strategis diperoleh dari rerata indikator kinerja. Sepanjang triwulan I capaian NKO pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian belum dapat diketahui karena penyusunan laporan kinerja masih dalam proses penetapan di masing-masing pimpinan, akan digeser pada triwulan ke III untuk dapat di monitoring capaian NKO pada triwulan I dan II.
2	Monev dokumen pengukuran dan pelaporan pada laporan triwulan I	Tertunda/ Digeser	Hingga triwulan ke II belum dapat dilaksanakan monitoring evaluasi pada kualitas pengukuran dan

			pelaporan karena laporan kinerja masih perlu ditetapkan oleh masing – masing pimpinan di level eselon I dan II, kegiatan ini akan digeser pada triwulan berikutnya. Ekon Go merupakan aplikasi berbasis kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian. Melalui aplikasi ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengukuran dan analisis capaian kinerja yang disampaikan
3	Reviu dokumen laporan kinerja unit kerja triwulan I	Tertunda/ Digeser	Hingga triwulan ke II, masih belum dapat dilaksanakan karena terdapat keterlambatan pada penetapan laporan kinerja triwulan I Biro MKKS berperan dalam melaksanakan monitoring dan mendistribusikan hasil reviu laporan kinerja kepada seluruh unit kerja.
4	Pelaksanaan evaluasi AKIP tingkat eselon I oleh Inspektorat	Tertunda/ Digeser	Biro MKKS telah menyiapkan bukti dukung persiapan evaluasi AKIP Es. I Sekretariat tahun 2026 pada link https://bit.ly/3PzKWfe sesuai dengan permintaan Inspektorat yang tertuang di ND No. PW.04.01/58/INS.M.EKON/03/2026 tentang Permintaan Data dalam Pengembangan Informasi Awal Evaluasi AKIP tahun 2026. Hingga triwulan II, belum dilaksanakan pelaksanaan evaluasi AKIP Es. I yang akan digeser pada triwulan berikutnya.
5	Koordinasi penyusunan laporan kinerja triwulan II	Terlaksana	Biro MKKS telah mengkoordinasikan permintaan penyusunan narasi kinerja triwulan I dan II tahun 2026 pada Nota Dinas No. AK.03.01/170/SET.M.EKO N.1/06/2026 di lingkungan

			Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Para Eselon I dan II memiliki kewajiban memonitor capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara periodik melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan dan di upload ke dalam aplikasi kinerja Ekon-GO beserta dengan data/dokumen pendukung.
6	Pemenuhan bukti dukung di ESR Kemenpan	Terlaksana	Biro MKKS telah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KemenPANRB pada ND No. B/41/AA.04/2026 bulan Mei 2026, terkait <i>Kick Off Meeting</i> penilaian ESR 2026 dan tindaklanjut LHE AKIP 2025 Kementerian. Selanjutnya hasil dari sosialisasi tersebut ditindaklanjuti dengan mengupload : (1) TL LHE AKIP; dan (2) Laporan Monev Renaksi sebelum tanggal 29 Mei 2026. Seluruh format laporan berada pada lampiran ND tersebut.
7	Finalisasi Permenko No. 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja	Terlaksana	Diskusi lanjutan Pembahasan dan Penyusunan Lampiran Revisi Permenko No.19/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kemenko Perekonomian

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Menyusun dan menetapkan SKP triwulan II pada seluruh pegawai Kemenko Perekonomian
- Rapat dengar pendapat atas masukan dan saran dokumen rancangan revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 19/2022 bersama Kementerian PAN RB dan Akademisi.
- Optimalisasi ruang penyimpanan dokumen pendukung narasi kinerja triwulan I dan II tahun 2026 pada Ekon GO.
- Mengikuti sosialisasi *Kick Off Meeting* Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2026 dan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB melalui surat Undangan No. B/25/AA.01/2026
- Pemutakhiran pohon kinerja unit-unit kerja sebagai tindaklanjut atas evaluasi Kementerian PAN-RB

- Persiapan untuk melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2026 tingkat Kementerian oleh Kemenpan RB
- Memperkuat koordinasi lintas ke deputian dan unit kerja melalui forum koordinasi rutin, harmonisasi kebijakan, serta penyalarsan indikator kinerja lintas sektor.
- Melaksanakan *refocusing* penggunaan anggaran pada masa efisiensi
- Melaksanakan koordinasi persiapan (*Entry Meeting*) evaluasi AKIP Kementerian oleh Kemenpan RB dan persiapan (*Entry Meeting*) evaluasi AKIP Internal Eselon I oleh Inspektorat
- Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja dengan seluruh unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Menjaga komunikasi yang baik kepada evaluator Kementerian PAN RB untuk dapat memahami *Logical Framework* dan keselarasan pemikiran dalam menilai Akuntabilitas Kementerian pada sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;
- Menggabungkan 2 (dua) tema kegiatan rapat ke dalam 1 (satu) kegiatan rapat ketika melaksanakan Konsinyering.
- Penetapan *timeline* tindak lanjut dokumen yang harus dihasilkan/disusun oleh entitas unit kerja pada akhir pelaksanaan rapat, untuk meningkatkan ketepatan waktu

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan II yaitu Rp. 34.995,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan penyusunan laporan kinerja pada triwulan I dan II di entitas eselon I dan II, disebabkan karena diperlukannya waktu penetapan draft laporan kinerja.
2. Rooling nya tim penilai dari Kementerian PAN RB yang lama, dengan tim penilai yang baru

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengejar ketertinggalan waktu penetapan laporan kinerja triwulan I dan II untuk dapat mengetahui progress Nilai Capaian Organisasi (NKO) hingga triwulan II
2. Melaksanakan koordinasi penyelaraskan kembali cara dan arah pandang catatan pada tim penilai yang baru, agar sesuai dengan rekomendasi yang diinginkan

1.2. Indeks Kualitas Kebijakan

Latar Belakang

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pilar tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian perwujudan asta cita ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi serta penyelundupan. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrument untuk mengukur kualitas kebijakan Pemerintah terutama dampak atau hasil bagi Pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence based). Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan. Indikator indeks kualitas kebijakan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas proses penyusunan, koordinasi, dan implementasi kebijakan publik yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun kriteria pengukuran IKK yaitu dilakukan setiap tahun, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, kebijakan pembangunan strategis memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas, dan kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran. Instrumen pengukuran menggunakan 11 pertanyaan. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan. Pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun terhadap 3 kebijakan sebagai objek pengukuran IKK.

Dalam mekanisme penilaian, setiap instansi melakukan pengajuan tiga kebijakan untuk dinilai melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian mandiri (*self-assessment*), verifikasi oleh LAN, proses umpan balik (*feedback*), perbaikan dan penyempurnaan dokumen, hingga penetapan hasil penilaian akhir. Instrumen pengukuran IKK terdiri atas 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi utama dengan rincian bobot sebagai berikut:

- Profil dengan bobot 10%
- Perencanaan Kebijakan dengan bobot 20%
- Implementasi Kebijakan dengan bobot 25%
- Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dengan bobot 30%
- Transparansi dan Partisipasi Publik dengan bobot 15%

Nilai IKK merupakan indeks komposit tertimbang dari seluruh instrumen pengukuran tersebut dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- <50,00 = kurang
- 50,00 – 64,99 = cukup
- 65,00 – 79,99 = baik
- 80,00 – 90,99 = sangat baik
- 91,00 – 100 = unggul

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan telah memasuki tahapan pengukuran yang mencakup penetapan objek penilaian IKK. Realisasi capaian pada triwulan ini belum berupa nilai indeks final, melainkan progres pelaksanaan tahapan kegiatan yang mendukung proses penilaian tahunan. Pelaksanaan kegiatan IKK dilaksanakan secara bertahap melalui rencana aksi tahunan yang meliputi:

- Pendataan peraturan/kebijakan untuk objek penilaian Tahun 2026 (Triwulan I);
- Penetapan objek penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (Triwulan II);
- Pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*), pengumpulan bukti pendukung, pengisian sistem IKK, proses umpan balik, serta perbaikan dan penyempurnaan dokumen (Triwulan III);
- Penyampaian hasil penilaian akhir IKK oleh LAN (Triwulan IV).

Pada Triwulan II Tahun 2026, fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada penyusunan dan penetapan SK Tim Kerja serta keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses pengukuran IKK.

Adapun capaian indikator kinerja utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.2				
1.2. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	40%	40%**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. nilai IKK dikeluarkan di akhir tahun oleh LAN.

Berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya, nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 mencapai 92,42 dari skala 100 dengan predikat "Unggul". Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi prinsip-prinsip perumusan, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan yang baik. Pada Tahun 2026, pengukuran kualitas kebijakan tetap difokuskan pada kebijakan strategis pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penilaian mencakup lima tahapan utama, yaitu Profil, Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan kinerja ini disusun sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk memetakan langkah-langkah strategis dan korektif dalam rangka memastikan pencapaian target IKK Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, beberapa tahapan yang telah dilaksanakan dalam proses penilaian Indeks Kualitas Kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelaksana pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan melalui penyusunan Surat Keputusan Tim Kerja yang melibatkan koordinator instansi dan analis kebijakan;

2. Menetapkan dan memastikan keterlibatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses pengukuran IKK;
3. Mengidentifikasi dan mengumpulkan populasi kebijakan yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai objek penilaian Tahun 2026.
4. Menentukan 3-4 kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Proyeksi capaian Triwulan II Tahun 2026 diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja serta keberlanjutan upaya peningkatan kualitas kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan *review assessment* terhadap Indeks Kualitas Kebijakan, termasuk evaluasi atas capaian indeks selama tiga tahun terakhir. Proses tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola kebijakan sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya serta langkah-langkah penguatan yang telah dilakukan, target Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Indeks Kualitas Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Pendataan peraturan/kebijakan untuk objek penilaian tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pendataan terhadap 227 peraturan/kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan kebijakan lainnya.
2	Penetapan objek penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Penilaian IKK Tahun 2026 pada 4 Mei 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Persiapan IKK Tahun 2026 pada 15 Juni 2026 • Telah ditetapkan objek penilaian IKK antara

			lain terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, dan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.
--	--	--	--

Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian target kinerja, beberapa upaya strategis yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan pendataan populasi kebijakan yang akan menjadi objek penilaian IKK Tahun 2026;
2. Melakukan pendataan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 421 Tahun 2024 tentang Penataan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 7 April 2026 dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2026.
4. Menghadiri *Getting Set-up* Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LAN pada 18 Juni 2026.
5. Menghadiri *Kick-Off* Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan oleh LAN pada 26 Juni 2026.
6. Menjadi narasumber terkait strategi optimalisasi pencapaian indeks kualitas kebijakan di Kemenko Pangan pada 30 Juni 2026.
7. Menetapkan 3-4 kebijakan yang akan menjadi objek pengukuran Kualitas Kebijakan diantaranya:
 - a. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Kebijakan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Pelaksanaan koordinasi dan rapat dengan penggabungan beberapa agenda pembahasan dalam satu kesempatan;
- Optimalisasi penggunaan fasilitas *Zoom Meeting* untuk mendukung efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- Pemanfaatan media berbagi pakai (*shared platform*) dalam proses pengumpulan dan distribusi data pengelolaan kinerja;
- Pengalokasian hasil efisiensi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya internal dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan benchmarking
- Pemetaan unit dan kesiapan pic masing-masing kebijakan dalam melaksanakan pengukuran IKK Tahun 2026.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi

sepanjang triwulan II yaitu Rp. 65.367,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain

- Kesulitan dalam pemilihan kebijakan yang akan dijadikan objek pengukuran kualitas kebijakan.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja untuk meningkatkan pemahaman instrumen dan kualitas bukti dukung di tiap kebijakan.
- Melakukan perbaikan metode dokumentasi kebijakan di unit kerja

1.3. Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Memasuki Triwulan II Tahun 2026, landasan filosofis ini mengalami pergeseran paradigma ke arah kebijakan nasional yang lebih komprehensif, di mana Program Prioritas Pemerintah Digital (PP 07.10) dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan arah perluasan transformasi dari semula penataan administratif prosedural (e-Government) bergeser radikal menjadi tata kelola berorientasi outcome dan penciptaan nilai publik secara nyata. Langkah transisi strategis ini diimplementasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dan Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Pemerintah Digital guna menjamin keberlanjutan kinerja digital instansi pemerintah yang bermuara pada masa depan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan serta pengarusutamaan prinsip keterbukaan pemerintahan.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital merupakan perombakan menyeluruh cara instansi menilai kinerja digital pemerintah dengan menggeser fokus penilaian dari kapabilitas dan kebijakan di area hulu menjadi kinerja, implementasi, dampak nyata, serta kepuasan pengguna layanan di area hilir. Evaluasi ini dilaksanakan guna mengukur kemajuan pelaksanaan digitalisasi secara riil, mempermudah pengisian, mengurangi beban administratif instansi, sekaligus meningkatkan kualitas data secara nasional. Sesuai dengan fokus RPJMN 2025–2029, ruang lingkup penilaian Indeks Pemerintah Digital dikonsolidasikan ke dalam 7 Aspek Penilaian Utama, yaitu:

- Aspek Tata Kelola dan Manajemen (Bobot 10%), mencakup indikator tata kelola dan manajemen layanan;

- Aspek Penyelenggara (Bobot 10%), mencakup indikator sumber daya manusia dan kolaborasi pemerintah digital;
- Aspek Data (Bobot 15% - Baru), mencakup indikator tata kelola data, operasional spasial, dan pembangunan statistik;
- Aspek Keamanan Pemerintah Digital (Bobot 15%), mencakup indikator audit keamanan, perlindungan data pribadi, penerapan kriptografi, dan kapabilitas penanganan insiden siber;
- Aspek Teknologi Digital (Bobot 10%), mencakup indikator aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital;
- Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Bobot 15% - Baru), mencakup keterpaduan proses bisnis lintas sektor, integrasi aplikasi, portal layanan digital, dan interoperabilitas data;
- Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Bobot 25% - Baru), mencakup fasilitas dukungan pengguna dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Penilaian evaluasi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) didasarkan pada informasi dan pemenuhan instrumen yang diringkas secara radikal dari semula 47 indikator pada SPBE lama menjadi hanya 20 indikator utama pada Indeks Pemerintah Digital. Penilaian ini dilakukan secara integratif dengan memperkuat Once-Only Principle, di mana instansi tidak wajib mengisi seluruh dokumen secara tahunan serentak melainkan cukup menyerahkan data satu kali saja melalui koordinasi kolaboratif lintas Kementerian/Lembaga pengampu (seperti Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN). Pada fase peralihan tahun 2026 ini, mekanisme evaluasi digeser menuju skema penilaian yang lebih fleksibel berbasis sinkronisasi data nilai menggunakan instrumen penyesuaian target (Kalkulator Pemdi) guna mengantisipasi konversi instrumen baru demi mencapai pemenuhan target Indeks Pemerintah Digital nasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara akuntabel.

Penilaian evaluasi Pemdi didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, serta penilaian visitasi. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan penilaian evaluasi Pemdi dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 1 - Tata Kelola dan Manajemen	2	10%
Aspek 2 - Penyelenggara	2	10%
Aspek 3 - Data	4	15%
Aspek 4 - Keamanan Pemerintah Digital	4	15%
Aspek 5 - Teknologi Digital	2	10%
Aspek 6 Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	4	15%
Aspek 7 Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	2	25%

Klasifikasi Nilai Pemdi:

- 4,0 s.d. $\leq$ 5,0 Memuaskan
- 3,51 s.d. $\leq$ 4,0 Sangat Baik
- 2,51 s.d. $\leq$ 3,50 Baik
- 1,51 s.d. $\leq$ 2,50 Cukup
- 1 s.d. $\leq$ 1,50 Kurang

*) Target penilaian: Predikat Cukup (indeks minimal 1,51)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 1,7. Penetapan target untuk tahun 2026 didasarkan pada target nasional mengingat evaluasi kinerja pemerintahan digital merupakan penilaian baru. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) terealisasi sebesar N/A, hal tersebut dikarenakan belum dilakukan penilaian hingga laporan ini disusun. Namun nilai tersebut akan berubah karena terdapat tahap penilaian dokumen dan finalisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tabel perhitungan persentase kinerja Triwulan II sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.3				
1.3. Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	Indeks	1,7	1,7**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Indeks SPBE Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Penataan integrasi dan interoperabilitas sistem dan layanan, serta peningkatan kapasitas SDM Digital meliputi aspek SDM Pemerintah Digital dan SDM Aspek Data	Terlaksana	Telah dilakukan Instalasi Platform Geoportal Palapa untuk integrasi data geospasial pada instansi
2	Penajaman indikator prioritas	Terlaksana	• Mengikuti pelaksanaan kickoff Evaluasi Kinerja

	Pemerintahan Digital (PEMDI) yang akan ditingkatkan dalam jangka pendek dan menengah		Pemerintah Digital Tahun 2026 • Melakukan Penyusunan Arsitektur Pemdi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Penataan tata kelola data, statistik sektoral, informasi geospasial • Identifikasi indikator pada Indeks Pemdi serta tindak lanjut hasil evaluasi
3	Pelaksanaan audit TIK, dalam rangka penguatan tata Kelola manajemen pemerintahan digital	Terlaksana	Dilakukan Audit TIK secara internal oleh Inspektorat yang meliputi Audit Keamanan, Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur. Namun Audit Infrastruktur tidak dilaksanakan karena Objek Audit terletak di Infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN)
4	Pemutakhiran system informasi arsitektur PEMDI pada layanan pendukung	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi terkait Pemutakhiran Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Melalui Optimalisasi Belanja TIK dengan Mekanisme Clearance

Upaya nyata dan kegiatan lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Clearance Pemdi dan EPSS;
2. Melakukan Workshop Transfer Knowledge Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Generatif;
3. Melakukan Rapat Pengembangan Informasi Awal Audit TIK;
4. Mengikuti Kegiatan KATA KAMI 2026: Audit Keamanan SPBE/Pemdigi;
5. Melakukan Permintaan Informasi Awal dalam Rangka Prosedur dan Ruang lingkup Audit Keamanan Pemdi;
6. Rapat Kebijakan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;
7. Mengikuti Koordinasi teknis pengamanan dan penonaktifan temuan URL tersisipi konten perjudian pada situs web instansi pemerintah;
8. Melakukan Rapat Pemutakhiran Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Melalui Optimalisasi Belanja TIK dengan Mekanisme Clearance, Penguatan Keamanan Siber dan Kerja Sama;
9. Mengikuti rapat kickoff Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
10. Mengikuti Sosialisasi Integrasi SIMP@N

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari

efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya telah diselenggarakannya rapat koordinasi terkait Evaluasi kinerja Pemerintah Digital menggunakan aplikasi zoom yang dapat menghemat anggaran. Kemudian penggunaan kembali fasilitas ruang rapat kantor untuk rapat koordinasi sehingga proyeksi efisiensi lebih maksimal dan hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 52.547,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut :

1. Proses penataan integrasi dan interoperabilitas data spasial lintas instansi memerlukan koordinasi teknis yang intensif dan penyesuaian data geospasial secara berkala agar pemanfaatan Platform Geoportal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berjalan optimal.
2. Pelaksanaan Audit Infrastruktur TIK secara Internal oleh Inspektorat belum direalisasikan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan objek audit utama berada di dalam ekosistem dan dikelola langsung oleh infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN)
3. Proses penyusunan kebijakan formasi Jabatan Fungsional Sandiman dan Jabatan Fungsional Surta masih memerlukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Organisasi Tata Laksana untuk memastikan penguatan aspek keamanan siber pemerintah digital berjalan terstruktur dan aspek penyelenggaraan Informasi Geospasial lebih optimal
4. Belum mendapatkan rekomendasi anggaran (clearance) belanja Pemdi karena terdapat ketentuan baru yang tercantum pada Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 8 Tahun 2024, Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance)

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu

1. Melakukan koordinasi dengan produsen data spasial terkait data geospasial yang akan diintegrasikan pada geoportal serta mengadakan bimbingan teknis terkait pemanfaatan platform Geoportal.
2. Melakukan justifikasi terkait tidak dilaksanakannya audit infrastruktur pada objek audit dan mengadakan identifikasi lebih lanjut mengenai audit TIK Pemdi
3. Menyusun rancangan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan pada Jabatan Sandiman dan Jabatan Surta.
4. Melakukan koordinasi secara intensif agar penyesuaian arsitektur versi baru dapat berjalan lebih optimal.

1.4. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh K/L dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.

Penilaian IPPN ini dapat menggambarkan kondisi perencanaan pada instansi dalam hal tingkat keselarasan perencanaan di Pemerintah Pusat, tingkat kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan, dan kualitas dokumen perencanaan dalam menyelesaikan isu pembangunan serta mencapai prioritas pembangunan.

Komponen penilaian IPPN adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	SUB KOMPONEN	DOKUMEN YANG DINILAI
1	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra-RPJM
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra	Renstra-Renja
		Kepatuhan Renja terhadap RKP	Renja-RKP
2	Sinkronisasi	Kepatuhan anggaran K/L untuk mencapai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA-RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja	RKA-Renja
		Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA-RKP
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan Sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait	RPJMN-Renstra K/L

Pada tahun 2025, IPPN tidak menilai sub komponen 2.a yaitu Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada tahun Perencanaan. Rekomendasi yang diberikan oleh penilai untuk meningkatkan indeks perencanaan Kemenko Perekonomian adalah:

- Penguatan Sinkronisasi Pagu Anggaran
- Peningkatan Konsistensi Target-Rincian Output

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 96. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama—dengan tanpa target triwulan. Penilaian IPPN kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, dengan predikat sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
91-100	Sangat Baik
81-90	Baik
71-80	Cukup Baik
61-70	Kurang
<60	Sangat Kurang

Pada triwulan II tahun 2026, nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional belum memiliki nilai realisasi, karena hasil penilaian IPPN dilakukan Bappenas dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Namun, prakiraan dari nilai yang akan diperoleh di akhir tahun dapat diprediksi melalui pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.4				
1.4. Indeks				
Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	96%	50%**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulan. karena nilai IPPN dikeluarkan pada akhir tahun.

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 telah tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan

1	Penyusunan Revisi Renja 2026 sesuai dengan Pemutakhiran RKP 2026	Tertunda	Usulan Revisi Renja 2026 akan diusulkan pada bulan ke-1 Triwulan III menunggu penetapan Pemutakhiran RKP 2026
2	Mengevaluasi dan melakukan pengendalian PAgu Anggaran RO pada Renja 2026 dan RKA K/L 2026	Terlaksana	Melakukan analisis terhadap usulan pergeseran pagu pada level RO sampai kegiatan dan Melakukan analisis terhadap pergeseran pagu belanja perjalanan dinas.
3	Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN 2026	Terlaksana	Mengkompilasi laporan capaian RO PN pada Triwulan I.
4	Sinkronisasi Renja 2026 dengan Revisi DIPA 2026	Tertunda	Sinkronisasi antara dokumen Renja dengan revisi DIPA belum dapat dilakukan karena adanya maintenance sistem pada kedua aplikasi tersebut
5	Meneliti usulan unit kerja pada Renja KRISNA 2027 dengan dokumen TOR dan RAB yang diusulkan berdasarkan pagu indikatif	Tertunda	Penelitian Tertunda dilakukan pada TW II karena usulan TOR dan RAB seluruh unit kerja baru diterima Biro MKKS pada akhir Juni
6	Menyesuaikan Rancangan Renja 2027 dan RKA K/L 2027 berdasrkan usulan TOR dan RAB	Terlaksana	Penyesuaian Rancangan Renja 2027 telah dilakukan berdasarkan TOR dan RAB pasca penetapan Pagu Indikatif TA 2027

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas usulan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas untuk menyusun Rancangan Renja Kemenko Perekonomian Tahun 207 sesuai—mengacu pada SB Pagu Indikatif TA 2027
2. Melakukan pembahasan bersama Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Unit Keasdepan untuk membahas isu strategis serta penyesuaian tagging RO PN dan PKPN—utamanya yang terkait hilirisasi dan energi terbarukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Kinerja Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan rapat koordinasi bersama menggunakan via aplikasi Zoom yang dapat menghemat anggaran, pelaksanaan rapat koordinasi yang menggabungkan beberapa agenda.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu Penyusunan Rancangan Renja Kemenko Perekonomian Tahun 2027 akan diajukan tambahan anggaran karena Pagu Indikatif TA 2027 sama persis dengan pagu anggaran eksisting 2026 pasca penajaman.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penyelarasan Program Kerja bersama K/L di bawah lingkup koordinasi untuk penyusunan Renja tahun 2027.
- Melakukan penelitian kebutuhan anggaran berdasarkan usulan tambahan anggaran yang disampaikan oleh unit kerja.

1.5. Capaian Prioritas Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Prioritas Nasional merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana Kemenko Perekonomian berkontribusi secara langsung dalam mengoordinasikan dan mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

IKU ini menilai kinerja efektivitas Output K/L dengan membandingkan capaian dan target Rincian Output (RO) yang mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional.

Penilaian IKU Capaian Prioritas Nasional mengacu pada metodologi evaluasi yang digunakan oleh Kemen PAN-RB melalui lembar kerja evaluasi. Nilai Capaian Prioritas Nasional didapat dari Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang tercapai dibandingkan dengan Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang diampu.

Rincian Output yang mendukung Prioritas Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah:

- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor.
- Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional.
- Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD.
- Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030.
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan.
- Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi.
- Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan.

- Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik.
- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei.
- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan.
- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja.
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor.
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hillirisasi Nikel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Hingga Triwulan II tahun 2026, Capaian RO yang mendukung PN berdasarkan activity yang dilaksanakan telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri oleh unit kerja berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga Triwulan II 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.5				
1.5. Capaian Perencanaan Prioritas Nasional	%	50%	50%**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Laporan kinerja ini dibuat untuk dapat memetakan langkah korektif strategis demi tercapainya target nilai yang ditetapkan, perbaikan format laporan Capaian Prioritas Nasional pada Tahun ini diperuntukan mendukung pelaporan yang lebih komprehensif.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan Prioritas Nasional			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Monitoring capaian kinerja RO Triwulan I tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan data capaian kinerja RO yang mendukung PN pada Triwulan I tahun 2026
2	Koordinasi Penyusunan Rencana	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan dan pendistribusian N ota

	Aksi Pelaksanaan RO PN tahun 2026		Dinas terkait pelaporan capaian kinerja RO yang mendukung PN pada Triwulan I tahun 2026
3	Monitoring capaian kinerja RO Triwulan II tahun 2026	Diundur/Bulan Juli	Monitoring capaian kinerja RO Triwulan II tahun 2026 akan diundur pada bulan JULI

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Menyiapkan dokumen capaian RO yang mendukung PN ke dalam *shared drive* agar dapat digunakan sebagai bahan analisis secara bersama.
2. Melakukan koordinasi internal dengan unit terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN Tahun 2026.
3. Menyiapkan jadwal pelaksanaan koordinasi dan pemantauan secara berkala

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pemanfaatan rapat koordinasi secara daring
- Optimalisasi penggunaan penyimpanan bersama berbasis *cloud*
- Pemanfaatan data capaian dan dokumen pendukung pada tahun sebelumnya sebagai bahan analisis di tahun ini
- Penggunaan sumber daya manusia yang tersedia secara kolaboratif antar pegawai sesuai tugas dan kompetensinya

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II tahun 2026 yaitu Rp. 29.834.487,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Pelaksanaan rencana aksi belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal triwulan I karena masih diperlukan proses koordinasi dan konsolidasi data dengan unit terkait

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melaksanakan percepatan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja untuk penyusunan rencana aksi guna memastikan ketersediaan data dan bahan pendukung yang dibutuhkan.

1.6 Capaian Indikator Kinerja Utama

Latar Belakang

Indikator capaian indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencapai target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja. IKU ini dirancang agar dapat mencerminkan hasil strategis yang ingin dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun IKU yang menjadi indikator penilaian meliputi:

- Pertumbuhan ekonomi
- Biaya logistik
- Pembentukan modal tetap bruto
- Rasio PDB Industri pengolahan
- Devisa pariwisata
- Rasio PDB pariwisata
- Indeks ketahanan energi
- Indeks daya saing digital di tingkat global
- Tingkat inflasi
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
- Tingkat pengangguran terbuka
- Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian
- Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian
- Nilai RB Kementerian

Capaian IKU dihitung berdasarkan realisasi terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi, akurasi, dan konsistensi data. Penilaian capaian IKU mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kualitas koordinasi lintas sektor yang menjadi mandat utama Kemenko Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian adalah 100%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.6				
1.6. Capaian Indikator Kinerja	%	50%	50%**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Nilai capaian indikator kinerja Menteri belum dapat ditentukan karena hasil akhir nilai dikeluarkan pada akhir tahun oleh KemenPAN RB. Pada tahun 2025, perolehan nilai Capaian Indikator Kinerja Kemenko Perekonomian sebesar 100% dengan skor indeks 5,20 atau meningkat 0,7 dari skor indeks tahun 2024 sebesar

5,13. Sehingga diproyeksikan pada tahun ini capaian IKU Menteri optimis dapat terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Renaksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indikator Kinerja Utama			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Pelaporan capaian kinerja triwulan II	Tertunda/ Digeser	Biro MKKS masih menyusun draft laporan kinerja triwulan II yang perlu ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian akan di upload kedalam aplikasi berbasis kinerja Ekon GO.
2	Pemetaan strategi perbaikan yang dilakukan pada triwulan II	Tertunda/ Digeser	Hingga triwulan II, belum dapat dilakukan strategi perbaikan karena masih menunggu dokumen laporan kinerja ditetapkan
3	Perhitungan nilai PKO 2025	Terlaksana	Menindaklanjuti kegiatan Und. Rapat No. AK.04.01/56/SET.M.EKON. 1/04/2026 tentang <i>Kick Off Meeting</i> penyusunan laporan penilaian kinerja organisasi tahun 2025, Biro MKKS sebagai koordinator penilai mendorong seluruh Sekretaris Deputy untuk ikut mengkoordinasikan penyusunan laporan PKO kepada entitas eselon I dan II di lingkup ke deputian. Biro MKKS pada lingkup Sekretariat telah menindaklanjuti hasil rapat melalui ND No. AK.01.01/136/SET.M.EKO N.1/05/2026 tentang penetapan laporan PKO. Kemudian melaporkannya langsung kepada Menteri melalui ND No. AK/56.1/SES.M.EKON/04/2026 tentang hasil laporan PKO, begitu pun juga dengan unit-unit ke deputian

			Adapun table nilai final perhitungan PKO 2025 di lingkup Kementerian dapat diperoleh pada link https://bit.ly/3RTjOIS
4	Pelaksanaan dialog kinerja triwulan II bersama TIM PKO	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat bersama pembahasan penilaian kinerja organisasi (PKO) bersama dengan seluruh Tim PKO di unit kedeputian

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5/2026 tentang Tim Penilai Kinerja Organisasi Kemenko Perekonomian
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian No. 34/2026 tentang Tim Penilai Kinerja Organisasi di lingkungan Sekretariat Kemenko Perekonomian
- Menyenggarakan forum diskusi untuk mengidentifikasi dan menyusun laporan kinerja organisasi
- Melaksanakan koordinasi dalam bentuk Nota Dinas terkait penyampaian laporan hasil perhitungan PKO di level kedeputian
- Menkoordinasikan seluruh unit kerja kedeputian untuk dapat menyusun dan menetapkan laporan hasil perhitungan PKO dan SK TIM Penilai di lingkup entitas eselon I dan II kedeputian
- Mendistribusikan secara merata tugas dan tanggung jawab Tim Penilai PKO kepada Sekretaris Deputy

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan asistensi atau dialog kinerja melalui *zoom meeting*
- Pengaplikasian media penyimpanan berbagi pakai berbasis *cloud*
- Pengaplikasian *Artificial Intelligence* untuk mendapatkan analisis terkait perencanaan kinerja dalam menunjang kinerja yang lebih baik.
- Digitalisasi dokumen laporan kinerja organisasi dan optimalisasi ruang simpan bersama berbasis *cloud*

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 22.384.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Keterlambatan beberapa unit kerja dalam melaporkan kembali laporan penilaian kinerja organisasi (PKO) tahun 2025
- Masih terdapat beberapa unit kerja yang melakukan banding atau tidak puas kepada Tim Penilai dengan hasil PKO yang diterima

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Menegaskan *timeline* dan *follow up* berkala kepada Sekretaris Deputi untuk dapat membantu mengkoordinasikan pengumpulan laporan PKO pada unit kerja kedeputian
- Memberikan pengertian kepada unit kerja yang tidak puas dengan hasil nilai PKO oleh Tim PKO

1.7 Nilai Kinerja Anggaran

Latar Belakang

Pada Pasal 244 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian. Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana diamanatkan pada peraturan diatas, perlu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara periodik melaporkan data aspek evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu. Adapun beberapa data yang dilaporkan melalui SAKTI adalah Capaian Rincian Output, capaian sasaran program dan capaian sasaran strategis. Kemudian berdasarkan data yang diinput tersebut, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang terhubung dengan SAKTI melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang disampaikan Kementerian Keuangan secara periodik. Nilai kinerja anggaran dimaksud adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Sejak tahun 2024, penilaian NKA menggunakan rentang nilai dengan lima kategori mengacu kepada PMK Nomor 62 tahun 2023 yaitu:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	Nilai NKA > 90	Sangat Baik
2.	$80 < \text{Nilai NKA} \leq 90$	Baik
3.	$60 < \text{Nilai NKA} \leq 80$	Cukup
4.	$50 < \text{Nilai NKA} \leq 60$	Kurang
5.	Nilai NKA < 50	Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun oleh Kemenkeu. Pada Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Persentase pencapaian Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan diperkirakan telah tercapai sebesar 50% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.7				
1.7. Nilai Kinerja SMART Anggaran	Nilai	50%	50%	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Dengan mendorong realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk mencapai target, diharapkan secara tidak langsung unit kerja akan berusaha mencapai target capaian mulai dari Realisasi Rincian Output, Capaian Output Program, Capaian Sasaran Program dan Capaian Sasaran Strategis serta memperhatikan Standar Biaya Keluaran yang berarti pengelolaan dan kinerja anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin berkualitas.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai Kinerja Anggaran			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Indikator Kinerja Program, dan Capaian Rincian Output pada Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pelaporan Indikator Terkait
2	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Indikator Kinerja Program, dan Capaian Rincian Output pada Triwulan II Tahun 2026	Terlaksana	Akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2026
3	Monitorong efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar	Terlaksana	Telah dilakukan Pemantauan efisiensi dan efektivitas standar biaya

	Biaya Keluaran Triwulan II Tahun 2026		
4	Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan II Tahun 2026	Terlaksana	Telah Dilakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian *self assessment* Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada aplikasi SMART DJA untuk menentukan kriteria tiap indikator
2. Melakukan fasilitasi pelaporan capaian output bulanan melalui file berbagi pakai, untuk menjembatani antara aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan e-Monev Bappenas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Sentralisasi Dashboard Data Langganan berbagai pakai yang dapat mendukung kualitas kebijakan yang digunakan
- Optimalisasi Dashboard Data Perekonomian Internal

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan II yaitu Rp. 15.122.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Pelaksanaan pelaporan capaian IKU, SS, IKP, dan RO Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena masih diperlukan proses konsolidasi dan validasi data capaian dari unit kerja terkait

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melakukan percepatan koordinasi dan sinkronisasi data dengan unit kerja

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular
2. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
3. Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tingkat input material sirkular dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait tingkat input material sirkular diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait tingkat input material sirkular, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat dan daftar hadir;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua : Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana

aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang.

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait tingkat input material sirkular.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap kedua: Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan terkait Tingkat Input Material Sirkular hingga Triwulan II 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-2.1				
2.1.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja				
	%	50%	50%	100%

**nilai merupakan target triwulanan*

Penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah memasuki pada tahap pertama yaitu Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/permasalahan tingkat input material sirkular. Sesuai dengan amanat dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko Bidang Perekonomian mengampu indikator

Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular yaitu Tingkat Input Material Sirkular. PP tersebut mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 6 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau (di bawah Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi).

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Terdapat 3 arah kebijakan dan indikator utama Ekonomi Sirkular di Indonesia, antara lain:

1. Pengurangan penggunaan sumber daya dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular.

Indikator ini mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. 'Tingkat Input Material Sirkular' tidak hanya mencakup penggunaan bahan daur ulang tetapi juga bahan yang digunakan kembali - termasuk *reuse*, *refurbish*, remanufaktur, dan penggunaan bahan terbarukan dalam sebuah produk.

Indikator ini serupa dengan 'tingkat penggunaan secondary raw material' dan 'konten daur ulang', namun memiliki cakupan yang lebih luas yang mempertimbangkan semua jenis penggunaan bahan sekunder.

Dengan baseline target tahun 2023 sebesar 9%, target pada 2025 sebesar 9,2% dan pada 2029 sebesar 10%.

2. Perpanjangan daya guna produk dan material, dengan indikator Tingkat Daya Guna.
3. Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dengan indikator Tingkat Daur Ulang.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem sebagai acuan para pemangku kepentingan dalam mendorong transisi dari ekonomi linear menjadi sirkular di Indonesia. Lima sektor utama prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia antara lain: Pangan, Retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan tekstil). Kelima sektor ini mempresentasikan hampir 1/3 dari PDB Indonesia dan mempekerjakan >43 juta orang pada 2019.

Hingga Triwulan II 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular, disampaikan sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular.
- Mengikuti kegiatan *Knowledge Exchange to Europe on Circular Economy Implementation in the EU and its Member States* di Belgia dan Belanda.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2025. Hal ini didorong oleh kegiatan sinkronisasi dan koordinasi Tingkat Input Material Sirkular sudah dilaksanakan sejak awal tahun melanjutkan kegiatan dari tahun 2025. Mengingat koordinasi dan sinkronisasi yang cukup intens dalam mengidentifikasi isu dan sinkronisasi kebijakan di triwulan II 2026 maka diprediksi penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Sinkronisasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait RAN-ES	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular sebagai bagian dari pelaksanaan RAN-ES pada 29 April 2026. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Strategis: Rencana Pembentukan <i>Steering Group</i> Ekonomi Sirkular pada tanggal 19 Mei 2026.
2	Identifikasi kebijakan dan regulasi kebijakan ekonomi sirkular di K/L	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD dengan BRIN terkait penajaman kajian kebijakan penguatan industrialisasi kendaraan listrik melalui insentif TKDN dan pengelolaan limbah baterai pada 16 April 2026

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada 23 Januari 2026.
- Rapat koordinasi *kick-off* proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular pada 27 Februari 2026.
- Mengikuti kegiatan *Knowledge Exchange to Europe on Circular Economy Implementation in the EU and its Member States* di Belgia dan Belanda pada 20-24 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama

2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
4. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 34.569.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Masih terkendala kelembagaan yang belum final dan saat ini masih dalam tahap pembentukan *steering committee*.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

- Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
- Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
- Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat dan daftar hadir;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua: Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap kedua:

Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga Triwulan II 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-2.2				
2.2. Persentase				
Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	%	50%	50%	100%

**nilai merupakan target triwulanan*

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Indikator ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 4 bidang pembangunan sumber daya manusia yang mencakup penguatan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka tersebut, PPLP ditetapkan sebagai indikator ke-6 pada Program Prioritas 04.19 Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan.

PPLP memiliki peran strategis dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk laki-laki dan perempuan serta memantau perkembangan kesenjangan ekonomi berbasis gender. Capaian indikator ini menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif. Selain itu, PPLP memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi ekonomi laki-laki dan perempuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif gender dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan indikator yang mengukur besaran pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga. Perhitungannya menggunakan pendekatan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga antarwilayah serta pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2026, target pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp17.138 ribu per tahun dan perempuan sebesar Rp10.086 ribu per tahun. Adapun pada akhir periode RPJMN tahun 2029, nilai PPLP ditargetkan meningkat menjadi Rp17.899 ribu untuk laki-laki dan Rp10.603 ribu untuk perempuan. Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan bagi laki-laki maupun perempuan.

Meskipun tren PPLP ditargetkan terus meningkat, pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dominasi laki-laki pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, serta masih adanya kesenjangan upah menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pengeluaran per kapita. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan

kewirausahaan masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh akses yang setara terhadap teknologi digital maupun layanan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan yang masih berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender agar peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Hingga Triwulan II 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya yaitu terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Sinkronisasi kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui identifikasi hambatan struktural ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penguatan keterampilan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pencapaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dengan LPEM UI.
- Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai forum koordinasi dan pertukaran informasi terkait isu-isu strategis yang mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan ekonomi perempuan
- Melakukan pendalaman isu dan identifikasi tantangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, antara lain terkait akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, dan penguatan ekosistem usaha yang inklusif
- Menghimpun masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian program yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya pengumpulan masukan dan sinkronisasi kebijakan yang mendukung pencapaian target indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2025. Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga diprediksi penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II tahun 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Sinkronisasi dengan Kementerian PPN/Bapennas terkait RAN-ES	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi isu dan permasalahan terkait Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan melalui partisipasi dalam <i>Validation Meeting</i> kajian "Dari Potensi ke Partisipasi: Apa yang Membuat Perempuan Berpotensi Tinggi Memilih untuk Tidak Bekerja?" pada 28 Januari 2026.
2	Identifikasi kebijakan dan regulasi kebijakan ekonomi sirkular di K/L	Terlaksana	Telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan melalui pembahasan dan pemetaan kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan serta pengisian Evaluasi PUG mandiri sebagai penguatan basis data dan kebijakan responsif gender dalam mendukung pencapaian indikator PPLP.
3	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait PPLP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pembahasan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan bersama pemangku kepentingan terkait sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dan pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan pada 13 Mei 2026.
4	Pembahasan pedoman PUG	Terlaksana	Dokumen Pedoman PUG telah siap sejak akhir 2025. Namun, pembahasan rencana aksi tahun 2026 mengalami penundaan dan akan dijadwalkan ulang sebagai prioritas di triwulan berikutnya."

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Pengisian Evaluasi PUG mandiri melalui aplikasi evaluasi PUG sebagai instrumen pemetaan kondisi demografi sekaligus penguatan basis data kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 24 Februari 2026.

- Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Provinsi Banten sebagai upaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, termasuk akses terhadap lapangan kerja, kewirausahaan, literasi keuangan, dan penguatan kapasitas usaha perempuan pada 13 Mei 2026.



- Menghadiri Rapat Koordinasi Multipihak terkait dengan Perencanaan Kebijakan Ekonomi Perawatan (Care Economy) 2026-2027 pada tanggal 05 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Memanfaatkan FGD sebagai sarana koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu forum pembahasan.
- Mengoptimalkan data, hasil kajian, dan informasi yang telah tersedia sebagai bahan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan tanpa memerlukan pengumpulan data primer tambahan.
- Memanfaatkan media berbagi data dan dokumen secara elektronik untuk mendukung koordinasi, pertukaran informasi, serta tindak lanjut hasil pembahasan secara lebih cepat dan efisien.
- Mengintegrasikan pembahasan isu ketenagakerjaan, kewirausahaan, literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam satu rangkaian kegiatan guna menghindari duplikasi pelaksanaan forum koordinasi.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 29.798.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Capaian indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor sehingga

memerlukan koordinasi dan sinergi dengan banyak kementerian/lembaga terkait.

- Masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan, antara lain beban pengasuhan, keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, serta kesenjangan keterampilan yang dapat berdampak pada capaian indikator PPLP.
- Ketersediaan data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator masih perlu diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan.
- Melakukan identifikasi dan pendalaman isu strategis yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan melalui forum koordinasi, rapat, dan pemanfaatan hasil kajian dari berbagai pemangku kepentingan.
- Memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data serta informasi pendukung sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi yang mendukung pencapaian indikator PPLP.
- Mendorong penguatan perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.

3

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

Latar Belakang

Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dimanfaatkan dalam bentuk naskah kedinasan dan/karya tulis ilmiah yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan dalam bentuk disposisi pemanfaatan yaitu meliputi :

1. Penggunaan dalam penyusunan bahan koordinasi internal, lintas sektor, maupun tingkat nasional;
2. Penggunaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
3. Penggunaan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan

outcome, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah:

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Bidang Perekonomian dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga.
2. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 50%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan II 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-3.1				
3.1. Perempuan				
Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	%	50%	50%	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity, karena nilai persentase baru bisa diketahui pada akhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai sebesar 50%. Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektor yang ditindaklanjuti baru dapat diketahui nilainya pada akhir tahun.

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan industri halal global. Potensi tersebut tercermin dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026*, yang menempatkan

Indonesia pada peringkat keempat dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*, dengan capaian unggulan berupa peringkat pertama dunia pada sektor modest fashion, peringkat ketiga pada sektor makanan halal, dan peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah muslim, yang menunjukkan daya saing Indonesia pada berbagai sektor strategis ekonomi syariah meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan ekosistem halal nasional. Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi. Salah satu mitra strategis adalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang memiliki kapasitas keilmuan dan jejaring nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara IAEI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu memperkuat perumusan kebijakan, memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah, serta mendukung percepatan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terus mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam penguatan industri halal nasional, termasuk Program Wajib Halal Oktober (WHO) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta berbagai program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal, memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal, serta memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik maupun global.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.
- Mengawal Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- Monitoring implementasi serta kerja sama sektor prioritas, khususnya terkait sertifikasi halal dan fasilitasi perdagangan dalam kerangka Pasar Tunggal Uni Eropa (EU Single Market).
- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) melalui Rapat Rutin Badan Pengurus Harian inti IAEI
- Menjadi Keynote Speaker at AmCham Indonesia Halal Workshop 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem Halal dalam negeri.

2. Indonesia National Single Window (INSW)

INSW merupakan sistem elektronik nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor, impor, dan logistik antar instansi pemerintah dalam satu platform digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, tujuan utama INSW adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam memberikan efisiensi pelayanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi

di bidang ekspor, impor, dan logistik. INSW terus berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, iklim ekosistem investasi, serta memberikan kemudahan berusaha.

Isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun 2026 antara lain: penyesuaian regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM). PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamankan agar perizinan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (Iartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui sistem INSW. Indonesia juga akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor. Hal ini dikarenakan STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat.

Hingga triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan terkait Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2025-2026 Khususnya pada agenda pembentukan mandat Implementasi ISRM dan Integrasi data perdagangan internasional Selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan terkait Mekanisme Pengawasan Strategic Trade Management (STM) dimana sedang mengkaji bentuk regulasi STM (Perpres atau Undang-Undang), serta menentukan lembaga pengampu (K/L tertentu, Satgas bersama, atau Lembaga baru). Serta dirancang mekanisme pelacakan barang *dual-use* untuk komoditas nuklir, biologi, kimia, teknologi, dan sebagainya, dari asal barang hingga pengguna akhir (end-user) untuk memenuhi ketentuan dalam konvensi internasional.

3. Patriot

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada Prioritas Nasional (PN) I. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025-2029 pada tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan integrasi pembinaan ideologi Pancasila dengan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

Kemenko Perekonomian, melalui Biro MKKS turut mendukung penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi lintas K/L terkait tujuan, sasaran, dan indikator pembinaan ideologi Pancasila agar pelaksanaannya berjalan selaras dan terukur.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Program Patriotisme, disampaikan sebagai berikut:

- Melaksanakan Pembahasan Konfirmasi Capaian Penanggulangan Bencana Tahun 2025, Kementerian/Lembaga diminta menyampaikan dan memvalidasi data capaian penanggulangan bencana tahun 2025 sementara BNPB akan menyempurnakan hasil verifikasi sebagai

dasar penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi RIPB Tahun 2025;

- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029, pada RAN PE Tahun 2026-2029 Kemenko Perekonomian menjadi salah satu Kementerian terkait yang mengurus permasalahan potensi meningkatnya angka pengangguran akibat kurangnya keterampilan dan kesediaan lapangan kerja yang meningkatnya terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme;
- Melaksanakan Rapat Permohonan Pengisian serta Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode TW I Tahun 2026, Kementerian/Lembaga agar melakukan penyesuaian program sesuai perkembangan kebijakan dan kondisi pelaksanaan dengan tetap memperhatikan substansi Peta Jalan PIP serta menjaga koordinasi dan pelaporan;
- Melaksanakan Rapat Diseminasi dan Peluang Kolaborasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adapun rencana tindak lanjut strategis yang akan dilaksanakan adalah percepatan regulasi, penyusunan peta jalan, penguatan kapasitas dan pendampingan, audit dan evaluasi serta inklusi aktif;
- Menindaklanjuti atas Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas usulan Pejabat sebagai Anggota Tim Sekretariat Bersama dan Tim Kelompok Kerja K/L RAN PE Tahun 2026-2029.

Dalam kegiatan ini, membahas penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, ke depan akan dilakukan inventarisasi praktik baik, penyelarasan indikator pelaksanaan, serta penguatan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam program dan kebijakan pembangunan nasional guna memastikan implementasi berjalan konsisten.

Proyeksi triwulan II tahun 2026 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2026. Hal ini dikarenakan indikator penyelesaian rekomendasi lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan II. Identifikasi isu dan permasalahan, serta sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan dan diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan

1	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Capaian Penanggulangan Bencana Tahun 2025 pada 9 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Isu Strategis Rakor Dewan Pengarah INSW pada 16 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan Integrasi data Indonesia-Singapura pada 22 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan SEAFEC pada 22 April 2026. • Telah mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden No 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 pada 23 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Sertifikat Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada 29 April 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Peta Jalan PIP Periode TW I Tahun 2026 pada 12 Mei 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan
---	---	------------	---

			Keuangan Sosial Islam pada 22 Mei 2026 • Telah dilaksanakan Diskusi Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW pada 26 Mei 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Diseminasi dan Peluang Kolaborasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada 17 Juni 2026. • Telah dilaksanakan Persiapan Rapat Dewan Pengarah INSW Semester I Tahu 2026 pada 18 Juni 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Capaian Isu Strategis Implementasi <i>Strategic Trade Management</i> (STM) pada 22 Juni 2026.
--	--	--	--

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Telah dilaksanakan Rapat Internal Pemetaan Indikator, Isu, dan Usulan Program Kerja Tahun 2026 terkait dengan Ekonomi Syariah.
2. Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Komite Pengembangan UMKM Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada 21 Januari 2026.
3. Menghadiri Rapat Finalisasi Usulan Program Kerja Bidang VIII Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada 22 Januari 2026.
4. Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar Internasional BPOM: "Advancing Vaccines and ATMPs Regulatory Development and R&D Ecosystem Pathways from Upstream to Downstream" pada 28 Januari 2026.
5. Menghadiri FGD Rancangan Hukum dan Regulasi *Strategic Trade Management* (STM) di Indonesia pada 5 Februari 2026
6. Menghadiri Sosialisasi Standar Tata Kelola Pengembangan Layanan SINSW pada 10 Februari 2026.
7. Menghadiri Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Pengisian Form Quick Win Program Moderasi Beragama pada 12 Maret 2026.
8. Menghadiri Rapat Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) Indonesia – Amerika Serikat pada 13 Maret 2026.
9. Menghadiri Rapat Rutin Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (BPH IAEI) pada 8 April 2026 dan 25 Mei 2026.
10. Menjadi Keynote Speaker at AmCham Indonesia Halal Workshop 2026 dengan tema "Industry Readiness for the October 2026 Deadline" pada 3 Juni 2026.

11. Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas usulan Pejabat sebagai Anggota Tim Sekretariat Bersama dan Tim Kelompok Kerja K/L RAN PE Tahun 2026-2029 pada 30 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.
- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensi sepanjang triwulan II yaitu Rp. 25.587.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih perlunya penyelarasan program kerja diantara Komite Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam IAE
2. LNSW terkendala dalam penerapan kebijakan ISRM dikarenakan secara eksplisit tidak memiliki mandat sebagai dasar hukum terkait kewenangan pengelolaan manajemen risiko terintegrasi serta pemanfaatan *risk scoring* lintas kementerian/lembaga.

Berasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 4: Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
3. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja
4. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan
5. Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Penyelesaian

Latar Belakang

Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja

Penyelarasan program, anggaran, kinerja, dan kebijakan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan efektif. Upaya ini dilaksanakan untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan adanya penyelarasan, setiap unit kerja diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, mendukung prioritas pemerintah, serta memperkuat peran koordinasi kementerian dalam memastikan keselarasan indikator kinerja utama (IKU) di berbagai tingkatan

Kegiatan penyelarasan ini bertujuan untuk memperjelas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen RPJMN melalui penyusunan peta utama, peta prioritas nasional, serta peta strategi kementerian yang dapat menjadi acuan bersama. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan indikator kinerja yang selaras dengan karakteristik dan fungsi unit kerja, sehingga setiap unit dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan indikator kinerja utama kementerian hingga tingkat deputi.

Lebih lanjut, proses ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci koordinasi yang harus menjadi fokus perhatian, termasuk memastikan kesesuaian tugas dan fungsi antarunit, konsistensi antar dokumen perencanaan nasional, serta keterhubungan indikator kinerja pada setiap level melalui mekanisme cascading. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya strategi perbaikan kinerja yang berkesinambungan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kementerian dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan II tahun 2026 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja sebesar 50%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.1				
4.1.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	%	50%	50%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja Triwulan II berdasarkan pengukuran activity, karena nilai dikeluarkan diakhir tahun.*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Penetapan Perjanjian Kinerja, Manual IKU, dan Rencana Aksi	Terlaksana	Perjanjian Kinerja, Manual IKU, dan Rencana Aksi telah ditetapkan sesuai ketentuan.
2	Menyelaraskan Perjanjian Kinerja dengan Rencana Kinerja	Tertunda	Pelaksanaan penyelarasan PK dan Renja dilakukan setelah ditetapkannya Pemutakhiran RKP TA 2026
3	Identifikasi keselarasan IKU dan Rincian Output	Terlaksana	Identifikasi keselarasan IKU dan Rincian Output telah dilaksanakan sebagai dasar penyusunan dokumen kinerja.
4	Merevisi Rencana Kerja Kementerian	Tertunda	Usulan revisi Renja 2026 dilakukan setelah ditetapkannya Pemutakhiran RKP TA 2026

Upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Berkoordinasi bersama unit kerja eselon II yang terkait dengan RO yang mendukung Program Kebijakan Prioritas Nasional (PKPN) Kluster Kemandirian Enegeri dengan Direktorat PEMPMP, Direktorat Sinergi dan Tatakeola Perencanaan Pembangunan, dan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Bappenas.
- Berkoordinasi dengan Unit Kerja untuk penyusunan TOR dan RAB atas Pagu Indikatif TA 2027 terkait rencana Rincian Output yang akan dihasilkan pada TA 2027

Pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Memaksimalkan penggunaan fasilitas zoom meeting
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan p elatihan atau *workshop*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berb agi pakai (Google Drive)

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 29.886.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Sinkronisasi pagu hasil revisi DIPA ke Sistem Krisna- Renja belum dalam dilakukan karena adanya kendala pada kedua sistem tersebut.
- Pemutakhiran RKP 2026 masih belum ditetapkan.
- Pagu Indikatif TA 2027 yang ditetapkan masih kurang dibanding Pagu Anggaran 2026 pasca ABT sehingga Tahun 2027 berpotensi untuk diajukan tambahan anggaran kembali.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi bersama unit kerja eselon II yang terkait dengan kebijakan RO PN dan PKPN dengan Direktorat PEMPMP dan Direktorat Teknis Lainnya di Bappenas
- Usulan TOR dan RAB terkait rencana Rincian Output yang akan dihasilkan pada TA 2027
- Mengakomodasi kebutuhan anggaran sesuai dengan skala prioritas untuk perencanaan tahun 2027.

4.2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

Latar Belakang

Dokumen Program dan Anggaran terdiri dari Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja K/L, RKA-K/L dan DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Petunjuk Operasional Kegiatan (POK),Revisi POK, Revisi Renja Tahun Berjalan, Revisi DIPA Induk.

Dalam rangka mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan agenda pembangunan lima tahunan, Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Strategis K/L yang kemudian disebut Renstra K/L yang mengakomodasi rencana-rencana strategis jangka menengah pada tingkat K/L yang akan mendukung agenda RPJMN. Penyusunan Renstra K/L ini sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024 . Setiap tahun Menteri/Kepala Lembaga menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan serta mengacu pada program kerja K/L tahun selanjutnya. Rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan disebut juga Siklus Perencanaan dan Penganggaran yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, K/L mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RKA-KL dan DIPA yang berisi tentang petunjuk dan tata cara penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan program dan anggaran

yang berwujud dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Petunjuk teknis dari penyusunan dokumen perencanaan juga mengacu dan berpedoman pada Perdirjen Anggaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Penyusunan Rencana dan Program ini meliputi perencanaan program, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan dan penyelarasan program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya perencanaan yang disusun ini akan menjadi keluaran berupa dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L). Baik Renja maupun RKA K/L merupakan produk perencanaan yang dihasilkan dari siklus tahunan (berulang setiap tahunnya).

Selain perencanaan tahunan, dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan penyesuaian dokumen perencanaan pada tahun berjalan yang tertuang pada dokumen POK dan Revisi DIPA. Perubahan pada dokumen POK dan Revisi DIPA merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan unit kerja terhadap rencana pelaksanaan program dan anggarannya. Penyesuaian tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui mekanisme revisi anggaran dan/atau revisi informasi kinerja pada dokumen perencanaan. Revisi anggaran akan mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sedangkan penyesuaian Renja K/L akan mengacu Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembahasan RKP Tahun 2025.

Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses penyelesaian dokumen yang efektif. Proses penyelesaian dikatakan efektif dan berkualitas apabila penyusunan dokumen program dan anggaran terkait layanan perencanaan dan tugas serta fungsi Biro Perencanaan dapat diselesaikan sesuai dengan janji layanan atau tepat pada waktu yang ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan II tahun 2026 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu sebesar 50%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.2				
4.2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	%	50%	50%	100%

**Hasil Realisasi dan %Kinerja Triwulan II berdasarkan pengukuran activity, karena nilai dikeluarkan diakhir tahun.*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 telah tercapai 50%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU.			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Evaluasi dan pengendalian Pagu Anggaran Rincian Output triwulan I pada Renja dan RKA KL tahun 2026	Terlaksana	Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan Pagu Anggaran RO Triwulan I telah dilakukan sehingga menjadi dasar pengendalian anggaran pada periode berikutnya
2	Menyusun Renja Renja KL 2027 sesuai dengan Rancangan awal RKP 2027	Terlaksana	Dokumen Renja K/L 2027 telah disusun sesuai dengan arah kebijakan Rancangan Awal RKP 2027, guna menjaga konsistensi perencanaan dengan pembangunan nasional
3	Menyusun laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan RO PN	Terlaksana	Laporan evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan RO Prioritas Nasional telah disusun sebagai bentuk monitoring capaian target program prioritas
4	Sinkronisasi Renja dengan Revisi DIPA	Tertunda/ Digeser	Sinkronisasi antara dokumen Renja dengan revisi DIPA belum dapat dilakukan karena adanya maintenance sistem pada kedua aplikasi tersebut
5	Meneliti dan mereviu usulkan unit kerja pada Renja KRISNA 2027 dengan dokumen TOR dan RAB yang diusulkan berdasarkan Pagu Indikatif 2027	Tertunda/ Digeser	Penelitian Tertunda dilakukan pada TW II karena usulan TOR dan RAB seluruh unit kerja baru diterima Biro MKKS pada akhir Juni

6	Menyesuaikan Rancangan Renja 2027 dan RKA KI 2027 berdasarkan TOR dan RAB yang telah diteliti	Tertunda/ Digeser	Disebabkan tertundanya penelitian TOR dan RAB maka penyesuaian Rancangan Renja 2027 dan RKA K/L menjadi tertunda
7	Menyesuaikan dokumen TOR dan RAB, serta rancangan Renja RKA KL TA 2027 dengan mengacu pada Pagu Anggaran	Tertunda/ Digeser	SBPA belum ditetapkan hingga akhir Juni 2026
8	Melakukan revisi POK setiap bulan pada tanggal 25 dan revisi DIPA setiap triwulan	Terlaksana	Revisi POK dan revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi dan Finalisasi Renaksi SISMONEV TA 2026 bersama Kantor Staf Presiden.
2. Melakukan penelitian dan reuiu atas usulan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan II TA. 2026.
3. Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan II TA. 2026.
4. Revisi Pemutakhiran POK TA 2026.
5. Melakukan pembahasan rincian output baru dan rincian output yang mendukung PN dan PKPN pada tahun 2027.
6. Melakukan pemutakhiran halaman III DIPA untuk POK Triwulan II TA 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Optimalisasi aplikasi kinerja EKON GO dalam pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Penggunaan sarpras ruang rapat kantor untuk optimalisasi koordinasi secara terintegrasi dengan unit kerja
3. Penggunaan media digital (Cloud) dan aplikasi kinerja untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen bukti dukung
4. Sinkronisasi pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda kerja
5. Pembagian tugas dan peran yang jelas dengan PIC pengelolaan kinerja pada setiap unit kerja

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 42.329,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya penajaman belanja K/L untuk Tahun Anggaran 2026.
2. Pagu Anggaran untuk Tahun Anggaran 2026, ditetapkan hingga akhir Juni 2026. Sehingga berdampak pada penyusunan Renja dan RKA K/L.
3. RPerpres terkait Pemutakhiran RKP 2026, dimana terjadi keterlambatan dalam proses Perpres. Hal ini mengakibatkan mundurnya Revisi Renja 2026.
4. Belum ada keselarasan antara Perencanaan Program Kerja Kemenko Bidang Perekonomian dan K/L yang dikoordinasikan.
5. Penghitungan kebutuhan tambahan anggaran: belanja operasional, belanja pegawai dan belanja untuk menunjang tugas dan fungsi Kemenko Bidang Perekonomian TA 2027 yang diusulkan pada Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengusulkan percepatan penetapan SBPA dan SBPI dan Usulan Tambahan Anggaran 2027 sebagai acuan sementara dalam menyusun TOR dan RAB.
2. Menyediakan bimbingan teknis dan format standar untuk penyusunan TOR dan RAB agar sesuai dengan pagu indikatif.
3. Melakukan pemantauan aktif terhadap revisi DIPA dan menyesuaikan perencanaan secara cepat untuk menjaga kesesuaian anggaran.
4. Penyelarasan Program Kerja bersama K/L di bawah lingkup koordinasi untuk penyusunan Renja tahun 2027
5. Melakukan penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan prioritas pada triwulan III dan melakukan skema refocusing atau realokasi anggaran internal apabila memungkinkan.
6. Memprioritaskan program yang akan dilaksanakan agar anggaran lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dari output program.
7. Memperkuat koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal K/L yang terkait pada penetapan pagu indikatif maupun RPerpres.
8. Menggunakan metode berbasis kinerja dan data historis dalam perhitungan kebutuhan anggaran, serta melibatkan unit teknis dalam penganggaran.
9. Mengakomodasi kebutuhan anggaran sesuai dengan skala prioritas untuk perencanaan tahun 2027.

4.3 Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja

Latar Belakang

Persentase penyelesaian penyelarasan kerja sama dan kinerja merupakan ukuran dalam mengintegrasikan dokumen tata kelola pemerintah secara lebih strategis. Kegiatan ini menghasilkan dokumen :

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Laporan kinerja triwulanan
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Dokumen bukti dukung
5. *Memorandum of Understanding*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses bisnis terkait tata Kelola kerja sama dan kinerja, untuk dapat memperoleh nilai akhir dari IKU ini adalah dengan membagi antara jumlah dokumen yang diselesaikan dengan jumlah dokumen yang ditetapkan dikali dengan 100%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II tahun 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja adalah 35%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga triwulan II 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.3				
4.3.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	%	50%	50%	70%*

***nilai dihasilkan di akhir tahun*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Monitoring ketercapaian NKO Perjanjian Kinerja tahun 2025 triwulan I	Tertunda/ Digeser	Nilai Kinerja Organsasi merupakan rerata seluruh nilai sasaran strategis (NSS). Rerata Nilai Sasaran Strategis (NSS) maka akan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Sepanjang triwulan I capaian NKO pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian belum dapat diketahui karena penetapan laporan kinerja masih dalam proses di masing-masing pimpinan, rencana aksi ini akan digeser pada triwulan ke III

2	Penetapan konsep draft laporan kinerja triwulan II	Tertunda/ Digeser	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menyusun laporan kinerja triwulan I dan II untuk level eselon I dan II, namun laporan tersebut masih menunggu untuk dapat ditetapkan oleh pimpinan. Narasi laporan capaian kinerja terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi : (1) Tabel ringkasan capaian kinerja triwulan I tahun 2026, (2) Latar belakang IKU, (3) Hasil pengukuran kinerja, (4) Pelaksanaan rencana aksi, capaian program dan efisiensi penggunaan sumber daya, (5) Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target.
3	Evaluasi ketepatan dokumen pelaksanaan laporan kinerja triwulan I	Tertunda/ Digeser	Hingga triwulan II, laporan kinerja triwulan I masih dalam proses penetapan pimpinan, sehingga belum dapat dilaksanakan evaluasi. Kegiatan ini akan digeser pada triwulan berikutnya
4	Koordinasi antar unit kerja dalam penguatan kerja sama dan kinerja	Terlaksana	Melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan asistensi dan pendampingan, melaksanakan koordinasi pemenuhan data dukung evaluasi kinerja organisasi, dan optimalisasi aplikasi kinerja
5	Monitoring pelaksanaan kinerja dan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja	Terlaksana	Biro MKKS telah berupaya untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan kinerja dan kerja sama yang dijalankan oleh unit kerja agar berjalan sesuai dengan target, indikator, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Mengkoordinasikan permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II pada level entitas eselon I dan II di seluruh unit kedeputian
2. Menyusun *draft* final laporan kinerja triwulan I dan II pada lingkup Sekretariat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3. Menjabarkan hasil analisis capaian kinerja yang mendalam dan pengukuran kinerja sesuai dengan formulasi yang ditetapkan

4. Pelaksanaan forum diskusi untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi terkait *bottleneck* pelaksanaan ketercapaian target.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Optimalisasi aplikasi kinerja di Ekon-GO dalam pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
- Penggunaan sarana dan prasarana ruang rapat kantor untuk optimalisasi koordinasi secara terintegrasi dengan unit kerja
- Penggunaan penyimpanan media digital (*Cloud*) dan aplikasi kinerja untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen bukti dukun
- Sinkronisasi pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda kerja
- Pembagian tugas dan peran yang jelas dengan para PIC pengelolaan kinerja pada setiap unit kerja kedeputian dan kesekretariatan.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 36.456,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja dan dokumen pendukung kinerja
2. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai PIC pengelola kinerja yang ditunjuk pada tahun berjalan
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan koordinasi dan asistensi kepada unit kerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengejar ketertinggalan penyampaian laporan kinerja pada triwulan I dan II di lingkup unit kerja Perekonomian, dengan mempertegas timeline dan *follow up* rutin
2. Pelaksanaan *rolling* penugasan PIC Sumber Daya Manusia pengelolaan kinerja pada unit kerja, agar seluruh pegawai dapat merasakan dan memahami sepenuhnya tentang pengelolaan kinerja
3. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi karena waktu yang terbatas

4.4 Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian standar keluaran kebijakan merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen standardisasi keluaran

kebijakan. Dokumen standar keluaran kebijakan ini merupakan sebuah dokumen berbentuk pedoman dan/atau produk hukum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penerapan standarisasi keluaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap unit kerja.

Tahapan penyusunan standar keluaran kebijakan:

- (1) pengumpulan data,
- (2) penyusunan rancangan standar keluaran kebijakan,
- (3) pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan,
- (4) penyusunan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan, dan
- (5) diseminasi/sosialisasi penerapan standarisasi keluaran kebijakan.
- (6) Penyusunan rancangan dokumen dasar hukum

Keluaran/output yang dihasilkan/ditargetkan:

1. Data dan Undangan rapat serta daftar hadir
2. Notula/Risalah/Berita Acara
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf
4. Draft dokumen pedoman standar keluaran kebijakan
5. Dokumen Pedoman Standar keluaran kebijakan
6. Draft Dasar Hukum/Draft Naskah Urgensi/Draft Peraturan Menteri Koordinator

Rumus Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan:

$$\% \text{Penyelesaian Standar Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah Tahapan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Output yang Ditargetkan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan telah terealisasi sebesar 60%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap pengumpulan data, penyusunan rancangan/draft standar keluaran kebijakan, pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan, dan penyusunan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan berdasarkan penyempurnaan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan internal. Berikut ringkasan realisasi kinerja pada Triwulan II 2026:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.4				
4.4. Pesentase Penyelesaian Standar Kebijakan	%	60%	60%	100%

**Target tahunan **target triwulanan.*

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu penerapan standarisasi keluaran kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Dalam rangka pemutakhiran keluaran kebijakan dan perbaikan tata kelola diperlukan penyusunan standar keluaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja penyusunan kebijakan, menyajikan capaian

penyelesaian Standar Keluaran Kebijakan sesuai target yang ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Pengukuran Kinerja dalam penyelesaian Standar Kebijakan pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan melakukan penajaman dan penyempurnaan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan yang telah dikonsolidasikan dengan himpunan masukan konsultasi teoritis dan praktis secara eksternal dan eksternal.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Penetapan Standar Keluaran Kebijakan	Terlaksana	Telah dilakukan penyempurnaan atas dokumen Standar Keluaran Kebijakan
2	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Keluaran Kebijakan	Belum Terlaksana	• Didahului finalisasi substansi, yang mencakup penguatan desain pengukuran kinerja, integrasi dengan Manual IKU, penyusunan instrumen regulasi, dan penyelarasan dengan reformulasi kerangka pengelolaan kinerja organisasi berbasis <i>Critical Success Factor</i> (CSF). • Telah dilakukan penyiapan kerangka dasar hukum implementasi melalui pendalaman aspek kewenangan, ruang lingkup pengaturan, dan mekanisme penerapan, untuk memastikan keselarasan dengan penyusunan Pedoman Standar Keluaran Kebijakan serta penguatan tata kelola pengukuran kinerja.
3	Implementasi Standar Keluaran Kebijakan	Belum Terlaksana	Penyempurnaan substansi Dokumen Standar Keluaran Kebijakan telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2026. Namun,

			implementasi Standar Keluaran Kebijakan mengalami penyesuaian jadwal karena masih diperlukan penyelesaian sejumlah prasyarat implementasi yang bersifat fundamental terhadap tata kelola pengukuran kinerja organisasi, meliputi penyusunan mekanisme pengukuran dan evaluasi kepatuhan, pembentukan kerangka regulasi implementasi, serta penyesuaian dengan penyempurnaan kerangka pengelolaan kinerja organisasi. Penyelesaian prasyarat tersebut diperlukan untuk memastikan implementasi dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan memiliki landasan operasional yang memadai di seluruh unit kerja.
--	--	--	---

Realisasi capaian pada Triwulan II tahun 2026 mencerminkan penyelesaian tahapan penyempurnaan substansi standar keluaran kebijakan serta penyiapan penyusunan pedoman standar keluaran kebijakan sebagai prasyarat implementasi. Dalam periode ini telah dilakukan penyempurnaan kerangka konseptual Standar Keluaran Kebijakan melalui standarisasi jenis keluaran berbasis siklus kebijakan, penyusunan klasifikasi keluaran substantif dan administratif, serta penyesuaian standar keluaran sesuai karakteristik proses bisnis unit kerja. Selain itu, telah dilakukan penguatan desain pengukuran kinerja melalui perumusan mekanisme pengukuran dan evaluasi kepatuhan, integrasi Standar Keluaran Kebijakan ke dalam Manual IKU, serta penyesuaian dengan reformulasi kerangka pengelolaan kinerja organisasi berbasis *Critical Success Factor* (CSF). Sebagai bagian dari penguatan aspek implementasi, juga telah dilakukan konseptualisasi kerangka dasar hukum, pendalaman aspek kewenangan, ruang lingkup pengaturan, dan mekanisme penerapan, serta penyiapan kerangka dan substansi Pedoman Standar Keluaran Kebijakan guna memastikan implementasi memiliki landasan metodologis, regulatif, dan operasional yang memadai. Adapun tahapan diseminasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis belum terlaksanakan dikarenakan penyelesaian finalisasi penetapan dokumen pedoman. Kegiatan tersebut akan menjadi fokus pelaksanaan pada periode berikutnya untuk memastikan implementasi standar dilakukan secara efektif di seluruh unit kerja

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Telah dilakukan pengumpulan data serta pelaksanaan studi pustaka dalam penyusunan Standar Kebijakan, serta melaksanakan rapat

koordinasi dan pembahasan substansi dengan unit terkait di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Melakukan penyempurnaan rancangan pedoman berdasarkan hasil pembahasan dan masukan pemangku kepentingan internal

Tabel 3.1 Bentuk Keluaran pada Setiap Jenjang Penandatangani

No	Tahapan/ Aspek	Jenjang	Bentuk Keluaran														
			Pol- cy Ref- er- ence	Pol- cy Pap- er	Ma- ke- ing Keb- ijakan	Act- ing Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Ma- nu- al Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan
1	Perencanaan Kebijakan	Kelompok Kerja (Poljo)	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y						Y	
		JPT Pratama	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y	Y
		JPT Madya	Y	Y			Y					Y	Y	Y			Y
2	Implementasi Kebijakan	Poljo		Y				Y	Y								
		JPT Pratama		Y		Y		Y	Y		Y		Y	Y	Y		
		JPT Madya		Y				Y			Y	Y	Y	Y			

35 Pedoman Standar Keluaran Kebijakan

No	Tahapan/ Aspek	Jenjang	Bentuk Keluaran														
			Pol- cy Ref- er- ence	Pol- cy Pap- er	Ma- ke- ing Keb- ijakan	Act- ing Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Ma- nu- al Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan	Man- ual Keb- ijakan
3	Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan	Poljo			Y			Y	Y	Y							
		JPT Pratama		Y		Y		Y	Y			Y		Y	Y		
		JPT Madya		Y				Y				Y			Y	Y	
4	Transparansi dan Partisipasi Publik	Poljo				Y		Y	Y								
		JPT Pratama						Y	Y					Y	Y	Y	
		JPT Madya						Y								Y	

36

Pedoman Standar Keluaran Kebijakan

3. Pelaksanaan rapat penyempurnaan Standar Kebijakan dilaksanakan dengan pemangku kepentingan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memastikan Standar Keluaran sebagai sistem yang menjembatani penguatan keterkaitan antara proses kebijakan, keluaran yang dihasilkan, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Adapun bentuk penyempurnaan dilakukan pada beberapa aspek, diantaranya standardisasi jenis keluaran berdasarkan tahapan siklus kebijakan, penyusunan klasifikasi output substantif dan administratif, serta penguatan keterkaitan antara keluaran kebijakan dengan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Manual IKU, dan pencapaian sasaran strategis organisasi. Selain itu, dilakukan pembahasan mekanisme pengukuran dan evaluasi kepatuhan penerapan Standar Keluaran Kebijakan, termasuk pengembangan alternatif skema pembobotan keluaran berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

[illegible]

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain penyusunan Standar Keluaran Kebijakan merupakan inisiatif yang relatif baru sehingga belum tersedia referensi atau praktik baku yang dapat dijadikan acuan secara langsung; dan Pada periode pelaporan, kegiatan masih difokuskan pada penyusunan dan

penyempurnaan substansi standar, sehingga tahapan sosialisasi dan bimbingan teknis belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dialog kinerja perlu dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tepat waktu dan tepat sasaran sehingga berjalan optimal
2. Memperkuat mekanisme koordinasi lintas unit sejak tahap awal penyusunan SKK.

4.5 Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Latar Belakang

Sebagai bentuk keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, kegiatan penataan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2026 diarahkan pada penguatan tata kelola data dan integrasi sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital yang semakin terpadu. Upaya tersebut selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung proses bisnis organisasi dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan.

Dalam kerangka transformasi birokrasi, penataan data dan sistem informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan sinergi antar unit kerja. Ketersediaan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses, didukung oleh sistem informasi yang andal dan interoperabel, merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, serta penerapan tata kelola teknologi informasi dan keamanan informasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan keberlangsungan layanan digital yang optimal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, kebutuhan terhadap pengelolaan data dan sistem informasi yang terstandarisasi terus meningkat. Penataan data dan sistem informasi tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, tetapi juga mencakup penguatan kualitas data, integrasi layanan digital, peningkatan interoperabilitas antar sistem, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, seluruh sumber daya digital diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, Penataan Data dan Sistem Informasi diukur melalui persentase penyelesaian kegiatan penataan data dan sistem informasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan penataan data, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, serta penguatan tata kelola digital dalam mendukung transformasi Pemerintah Digital di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir triwulan II tahun 2025 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase penyelesaian penataan data dan sistem informasi sebesar 50% dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-4.5				
4.5 Persentase				
Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	%	50%	50%	100%*

**** Hasil Realisasi dan % Kinerja Triwulan II berdasarkan pengukuran activity saja**

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 telah tercapai 50%. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan II dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2026 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. PErsentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Rekonfigurasi perangkat jaringan internet	Terlaksana	Telah dilakukan konfigurasi perangkat jaringan internet
2	Menyusun identifikasi kebutuhan data	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan data
3	Melakukan reviu kegiatan statistic sectoral	Terlaksana	Telah dilakukan reviu terhadap kegiatan statistik sektoral
4	Menyiapkan mekanisme system help data dan system informasi	Terlaksana	Telah disiapkan mekanisme <i>Help Desk</i> Data dan Sistem Informasi
5	Implementasi <i>cloud based server</i> untuk storage data unit organisasi	Terlaksana	Telah diimplementasikan storage data unit berbasis cloud
6	Melakukan evaluasi SOP dan/atau	Terlaksana	Telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait

	kebijakan penataan data dan layanan system informasi		Penataan Data dan Layanan Sistem Informasi
7	Memutakhirkan SOP dan/atau kebijakan penataan data dan layanan system informasi	Terlaksana	Telah dilakukan pemutakhiran terhadap SOP Penataan Data dan Layanan Sistem Informasi

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Melakukan penyediaan layanan *video meeting/conference/webinar*;
- Melakukan penyediaan layanan email ekon;
- Melakukan penyediaan layanan pusat data termasuk dengan pusat data nasional;
- Penyediaan layanan hosting dan domain manajemen aplikasi ekon.go.id;
- Melaksanakan penyediaan data BPS tarif 0 rupiah melalui aplikasi silastik;
- Melakukan penyediaan layanan internet
- Membuat Laporan Kinerja Walidata 2025 sebagai bentuk reviu atas pelaksanaan kegiatan statistik sektoral;
- Melakukan pengesahan atas Surat Edaran Penyelenggaraan Statistik, Penetapan Kode Referensi, dan Pengelolaan Statistik;
- Melakukan pengesahan atas Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tentang Renaksi Satu Data, Manajemen Data, dan Penyelenggaraan Satu Data;
- Melakukan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data dan informasi statistik atas kegiatan statistik tahun 2026;
- Melakukan rapat koordinasi dengan inspektorat untuk persiapan audit TIK dalam aspek aplikasi, infrastruktur, dan keamanan;
- Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dalam penataan Data dan Layanan Sistem Informasi melalui pembuatan SOP keterbandingan dan konsistensi data;
- Melakukan *backup* data secara berkala;
- Melakukan pemantauan aktivitas anomali pada jaringan dan sistem informasi;
- Menyediakan kanal pengaduan layanan Data dan Sistem Informasi via whatsapp terkait jaringan dan aplikasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Mengurangi jumlah langganan data dengan memaksimalkan fungsi koneksi remote.
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah

1. kesulitan dalam menentukan 2 kegiatan statistik sektoral untuk Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral.
2. Kesulitan dalam menentukan aplikasi yang akan dilakukan audit TIK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu

1. aktif berkoordinasi dengan instansi Pembina satatistik (BPS).
2. Aktif berkoordinasi dengan Inspektorat dan Biro Hukum dan Organisasi.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 5: Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama diukur melalui Survei Kepuasan Layanan dengan responden para pejabat dan pegawai diluar Sekretariat Kemenko Perekonomian. Fokus pertanyaan pada Survei Kepuasan adalah jenis layanan yang dilaksanakan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada masing-masing kelompok substansi. Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama merupakan pertanggung jawaban atas seluruh pelaksanaan layanan yang telah diberikan. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek kualitas pelayanan, yaitu:

1. Ketanggapan Layanan (Responsiveness)
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan, atau kebutuhan layanan.
2. Keandalan Layanan (Reliability)
Mengukur sejauh mana layanan diberikan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.
3. Sarana dan Prasarana Layanan (Tangibles)
Menilai ketersediaan serta kualitas fisik/fasilitas, termasuk tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan.
4. Kepastian Layanan (Assurance)
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta membangun kepercayaan dan rasa aman.
5. Sikap dalam Layanan (Empathy)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian personal secara ramah, manusiawi, dan sesuai kebutuhan penerima layanan.

Seluruh aspek tersebut dirata-rata untuk dapat menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan, yang dikategorikan dalam 4 (empat) tingkat penilaian:

1. Sangat Tidak Puas

2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rerata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian, yaitu :

3. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 s.d 4
4. Puas (3), rentang nilai 3,01 s.d 3,50
5. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 s.d 3,00
6. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2,50

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 3.57 atau Sangat Memuaskan , dengan ringkasan table triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-5.1				
Indeks Kepuasan				
Layanan Biro	indeks	3 dari 4	3.57	119%
Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				

Salah satu indikator kinerja utama pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah Indeks Kepuasan Layanan yang diukur melalui survey kepuasan layanan dengan responden seluruh pejabat/pegawai pada unit - unit kerja lainnya diluar Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Laporan hasil tingkat kepuasan Layanan dari Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama disusun sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan II. Pada semester I dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dan Semester II dibulan Desember 2026. Kemudian pada akhir tahun, kedua nilai tersebut di rerata untuk mendapatkan nilai akhir indeks kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Pengisian kuesioner survey dilakukan oleh responden yang berasal dari luar unit Sekretariat Kementerian Bidang Perekonomian melalui tautan atau link <https://bit.ly/LayananSekre2026> dan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 19 Juni 2026. Nilai indeks kepuasan layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada semester I T.A 2026 sebesar 3,57 atau Sangat Memuaskan. Realisasi kinerja dari indikator ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 atau kategori puas.

SURVEI KEPUASAN LAYANAN SEKRETERAT

"Seberapa puas Anda dengan layanan kami?"

★★★★★

Data Responden

Unit Kerja/Kedudukan

<https://bit.ly/LayananSekre2026>

"Cantikan lebih lanjut mengenai pengalaman Anda bersama kami"

SUBMIT

Periode Pengisian Survei Kepuasan Layanan
Tanggal 1 s.d 15 Juni 2026

RESEPTORAN KORDINATOR BOKAH PERKODORAN
REPUBLIK INDONESIA

Sangat Baik

Index
Kepuasan Layanan
3.57

LAPORAN
SURVEI KEPUASAN LAYANAN BIRO
MANAJEMEN KINERJA/ADAN KERJA
SAMA
Semester I T.A 2026

<https://bit.ly/LayananSekre2026>

Survei ini mengukur 5 aspek - aspek pelayanan yaitu : Ketanggapan pelayanan (*Responsiveness*), Keandalan pelayanan (*Reability*), Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), Kepastian pelayanan (*Assurance*), dan Sikap pelayanan (*Emphaty*). Seluruh aspek ini dinilai untuk memperoleh informasi objektif kinerja dan tingkat kepuasan terhadap layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang meliputi layanan fasilitasi penguatan kinerja, layanan program anggaran, layanan analisis kebijakan, dan layanan data sistem informasi.

Pada semester I T.A 2026, indeks kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dapat disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Ketanggapan pelayanan (*Responsiveness*), indeks 3,59 – Sangat Baik
- (2) Keandalan pelayanan (*Reability*), indeks 3,62 – Sangat Baik
- (3) Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), indenks 3,49 – Sangat Baik
- (4) Kepastian pelayanan (*Assurance*), indeks 3,54 – Sangat Baik
- (5) Sikap dalam pelayanan (*Emphaty*), indeks 3,60 – Sangat Baik

Aspek Penilaian	Layanan Program dan Anggaran	Layanan Analisis Kebijakan	Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja	Layanan Data dan Sistem Informasi	Rerata Layanan pada Aspek Penilaian
Ketanggapan Layanan (<i>Responsiveness</i>)	3,57	3,60	3,63	3,54	3,59
Keandalan Layanan (<i>Reliability</i>)	3,63	3,54	3,69	3,63	3,62
Sarana dan Prasarana (<i>Tangible</i>)	3,51	3,51	3,46	3,46	3,49
Kepastian Layanan (<i>Assurance</i>)	3,49	3,57	3,57	3,51	3,54
Sikap dalam Layanan (<i>emphaty</i>)	3,63	3,60	3,63	3,54	3,60
Total	3,57	3,56	3,60	3,54	3,57

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II Ta. 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan draft survey kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Terlaksana	Penyusunan draft survey kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Semester II 2026, tidak hanya terlepas pada pembuatan <i>link</i> survey, tetapi termasuk juga penyusunan segala administrasi yang terdiri dari : • Draft ND permintaan pengisian survey layanan; • Draft ND penyampaian hasil laporan survey semester I 2026; • Draft Laporan Kepuasan Layanan; • Draft daftar survey <i>question</i> yang akan disampaikan kepada responden; • Editing <i>Flayer Survey</i> sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kepada para responden;
2	Penyusunan laporan hasil kepuasan layanan Biro	Terlaksana	Laporan survey kepuasan layanan manajemen kinerja dan kerja sama semester I

	Manajemen Kinerja dan Kerja Sama		2026 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil survey kepuasan layanan yang telah dilaksanakan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Laporan ini menjadi lampiran pada Nota Dinas penyampaian hasil survey kepuasan layanan Biro MKKS kepada pimpinan.
3	Penguatan infrastruktur layanan	Terlaksana	Penguatan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan dan optimalisasi layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan layanan, meningkatkan keandalan sistem dan sarana kerja, serta mendukung penyelenggaraan layanan yang efektif dan efisien.
4	Melaksanakan kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan	Terlaksana	Kegiatan <i>coaching</i> dan bimbingan telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

Upaya-upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Identifikasi permasalahan dan meningkatkan kompetensi pegawai
2. Analisis hasil survey dan identifikasi area perbaikan
3. Penyusunan rencana tindak lanjut penyempurnaan layanan tahun 2026
4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait standar dan budaya pelayanan
5. Pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas pendukung layanan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Optimalisasi aplikasi zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat koordinasi dan pendampingan
2. Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
3. Optimalisasi aplikasi kinerja Ekon GO
4. Optimalisasi laporan kendala aplikasi dan jaringan data informasi
5. Evaluasi layanan program anggaran, layanan data system informasi, layanan fasilitasi penguatan kinerja dan layanan analisis kebijakan kepada penerima layanan

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 11.445,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Ekspektasi tinggi penerima layanan dengan layanan yang diberikan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Terkendalanya aplikasi layanan karena gangguan jaringan
- Tingkat efektifitas pelaksanaan sosialisasi atau pendampingan kinerja yang diberikan kepada unit kerja
- Kepatuhan penerima layanan pada batas tenggang waktu pengumpulan dokumen, seperti bukti dukung dokumen kinerja dan anggaran
- Hasil kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tiap tahun selalu bernilai diatas 3,01 atau berpredikat Sangat Memuaskan, terkadang hal ini menjadi luput dari perhatian untuk dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Semakin meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada unit kerja sebagai penerima layanan, penguatan pada 5 (lima) aspek peningkatan kualitas layanan
- Pemeliharaan berkala pada aplikasi layanan, dan pemantauan laporan gangguan jaringan
- Menyampaikan materi sosialisasi yang dapat dipahami penerima layanan dan memastikan setiap unit kerja memahami substansi yang diberikan
- Melaksanakan *Follow Up* kepada para PIC unit kerja
- Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan terkait hasil nilai dan evaluasi kepuasan layanan, agar dapat terus menjadi perhatian dari pimpinan

6

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 6: Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2. Nilai AKIP Sekretariat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah ukuran dari tingkat pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro MKKS. Penilaian RB pada level Eselon II mengacu pada implementasi renaksi RB General. Persentase dari pelaksanaan renaksi dihitung dengan cara membandingkan antara total jumlah rencana aksi yang

terlaksana dengan total jumlah rencana aksi yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Biro MKKS menetapkan pelaksanaan RB yang meliputi :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB
3. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
4. Tingkat Maturitas SPIP
5. Nilai SAKIP
6. Indeks Perencanaan Pembangunan
7. Tingkat Digitalisasi Arsip
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
9. Indeks Tata Kelola Pemerintahan
10. Indeks Sistem Merit
11. Capaian IKU
12. Opini BPK
13. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14. Survei Penilaian Integritas (SPI)
15. Indeks BerAKHLAK

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan II tahun 2026, Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian adalah 90,88%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga triwulan II 2026. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-6.1				
6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				
	%	50%	42%	84%

****nilai dihasilkan di akhir tahun**

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB triwulan II	Tertunda/ Digeser	Pada triwulan ke II 2026, draft Persesmenko tentang Rencana Aksi RB General dan Tematik tahun 2026

			masih dalam proses finalisasi. Kendala yang ada disebabkan karena kebijakan Peta Jalan RB dari Kementerian PAN RB yang belum tersosialisasikan mengenai RB Tematik yang akan ditetapkan di tahun 2026. Sehingga menghambat penetapan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB tahun 2026, maka berakibat pada terhambatnya pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan RB Tematik belum dapat dilaksanakan. Penetapan finalisasi dokumen Persesmenko 2026 tentang Rencana Aksi RB di lingkungan Kemenko Ekon akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
2	Pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP triwulan II	Terlaksana	Melalui Nota Dinas No. PW.06.05/143/SET.M.EKO N.1/05/2026 tentang Pelaksanaan penilaian Mandiri SPIP di Lingkungan Kemenko Perekonomian. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menyusun kertas kerja penilaian mandiri SPIP oleh counterpart atau PIC Biro MKKS pada link https://bit.ly/KKSPIPEKON2026 Kertas Kerja yang disusun terdiri dari 3 (tiga) kertas kerja utama yaitu kertas kerja <i>Lead I</i>, kertas kerja <i>Lead II</i>, kertas kerja <i>Lead III</i>,
3	Penyusunan laporan kinerja triwulan II	Tertunda/ Digeser	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama mengampu tugas sebagai PIC dalam penyusunan laporan capaian kinerja Sekretariat dan Biro MKKS di triwulan II 2026. Hingga saat ini, Biro MKKS masih menyusun draft laporan kinerja triwulan II yang perlu ditetapkan oleh

			pimpinan. Kemudian akan di upload kedalam aplikasi berbasis kinerja Ekon GO.
4	Penyusunan revisi renja 2026 triwulan II	Tertunda/ Digeser	Hingga triwulan II, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama belum melaksanakan revisi anggaran
5	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI triwulan II	Terlaksana	Setiap Kelompok Substansi di Biro MKKS memiliki admin PIC Srikandi. Pelaksanaan dokumentasi SRIKANDI seluruhnya telah dijalankan secara optimal oleh para PIC dengan terukurnya Tingkat penyelesaian Dokumen SRIKANDI yang efisien dan efektif.
6	Monev realisasi anggaran	Terlaksana	Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Biro Umum dan SDM, hingga triwulan II ini realisasi anggaran Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Adalah 25,69% atau Rp. 3.696.628.545
7	Penyusunan RPD	Terlaksana	ND Penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan II 2026
8	Penyusunan bahan LOM triwulan II	Terlaksana	Biro Manajemen Kinerja membantu penyusunan bahan paparan <i>breakfast meeting</i> evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan target kinerja tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Kemenko Ekon
9	Pemenuhan dokumen Data Dukung	Tertunda/ Digeser	Pemenuhan dokumen bukti dukung kinerja belum sepenuhnya dapat
10	Pendukung pemeriksaan keuangan BPK triwulan II	Terlaksana	Biro MKKS mendukung pemeriksaan keuangan BPK melalui Nota Dinas, dokumen pendukung, Laporan, dsb nya yang di koordinasikan oleh kelompok substansi Program dan Anggaran di Biro MKKS
11	Koordinasi hasil rekomendasi BPK	Terlaksana	Telah dilaksanakan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan SPI tahun 2025
12	Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyampaian usulan data

			responden internal dan eksternal
13	Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	Terlaksana	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui portal social media @Biro.MKKS melaksanakan kegiatan publikasi tentang kegiatan <i>Forum Group Discussion, Award Ceremony, Sosialisai, Koordinasi, Sinkronisasi</i> dan Pengendalian yang seluruhnya disertai dengan penggunaan logo BerAKHLAK.
14	Koordinasi pengusulan agen perubahan	Terlaksana	Agen Perubahan merupakan individu yang mencerminkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam mendorong pelaksanaan RB di lingkup Kementerian Perekonomian. Sehingga ditetapkanlah Kepmen Koordinator Bidang Perekonomian No. 423 tahun 2025 tentang Agen Perubahan RB Kemenko Perekonomian

Hingga triwulan II 2026, aktivitas kegiatan yang dapat mendorong tinggi tercapainya IKU ini adalah :

1. Optimalisasi penggunaan SRIKANDI dalam distribusi persuratan
2. Penyampaian ND usulan nama anggota tim percepatan RB di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3. Menghadiri penyusunan rencana aksi RB General tahun 2026 yang di ketuai oleh Biro Hukum dan Organisasi
4. Penyusunan Draft laporan SPIP dan penetapan Kertas Kerja pengisian SPIP semester II
5. Mengoptimalkan akselerasi aplikasi dan website kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6. Mensosialisasikan nama-nama tim pelaksana agen perubahan yang mempunyai tugas sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi Solusi, mediator, dan penghubung.
7. Melaksanakan digital *working system* dan evaluasi pelaksanaan *Work From Anywhere*
8. Mengkoordinasikan permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II pada level entitas eselon I dan II di seluruh unit kedeputan
9. Menyusun *draft* final laporan kinerja triwulan I dan II pada lingkup Sekretariat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
10. Menjabarkan hasil analisis capaian kinerja yang mendalam dan pengukuran kinerja sesuai dengan formulasi yang ditetapkan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Penghematan kertas dan ruang arsip, dengan dashboard dan cloud dapat mempercepat pencarian dokumen pendukung dan efisiensi waktu kerja pegawai
2. Menyusun program dan anggaran yang lebih tepat sasaran dengan kegiatan
3. Peningkatan produktivitas pegawai dan optimalisasi penggunaan sarana kantor
4. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst)
5. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 63.665,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum tersosialisasikannya RB Tematik oleh KemenPAN RB, berakibat pada terhambatnya penetapan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB tahun 2026
2. Koordinasi penyusunan Bahan Paparan untuk rapat pimpinan terkendala dengan distribusi akses dokumen antar kelompok substansi
3. Kendala Aplikasi SRIKANDI menjadi hambatan dalam proses legalisasi surat untuk disampaikan kepada unit kerja
4. Revisi anggaran karena efisiensi di tahun 2026
5. Timeline pemenuhan dokumen pendukung kinerja dan kualitas dokumen bukti dukung menjadi hambatan tercapainya akuntabilitas kinerja yang baik

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Aktif melaksanakan koordinasi dengan KemenPAN RB terkait tematik RB yang akan ditetapkan pada tahun 2026
2. Menggunakan aplikasi berbagi *realtime* dalam menyusun bahan paparan untuk *Breakfast Meeting* atau *Forum Grup Discussion*
3. Berkoordinasi dengan kelompok kerja Data Sistem Informasi (DSI) dalam pemeliharaan aplikasi SRIKANDI
4. Penguatan kegiatan dengan anggaran terbatas, agar anggaran yang telah di efisiensikan tetap mendukung ketercapaian kinerja
5. Mensosialisasikan kepada unit kerja standar dokumen bukti dukung yang harus di upload dan batas waktu pengumpulan

6.2 Nilai AKIP Sekretariat

Latar Belakang

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan nilai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sesuai dengan Permenko No. 8 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pedoman evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP yang meliputi empat komponen dan bobot, yaitu :

- (1) Komponen Perencanaan Kinerja : **30%**
 Bobot Nilai:
 (a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (2) Komponen Pengukuran Kinerja : **30%**
 Bobot Nilai:
 (a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (3) Komponen Pelaporan Kinerja : **20%**
 Bobot Nilai:
 (a) Keberadaan : **4%**; (b) Kualitas : **6 %**; dan (c) Pemanfaatan : **10%**
- (4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : **20%**
 Bobot Nilai:
 (a) Keberadaan : **4%**; (b) Kualitas : **6 %**; dan (c) Pemanfaatan : **10%**

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP internal

- (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
- (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- (4) B (Skor > 60-70); Baik
- (5) CC (>50-60); Cukup
- (6) C (>30-50); Kurang
- (7) D (0-30); Sangat Kurang

Nilai AKIP Sekretariat ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat. Penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen, yaitu:

Nilai AKIP Internal = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal
--

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2026, Nilai AKIP Sekretariat yang terealisasi sebesar 79,5. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga triwulan II 2026, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-6.2				
6.2. Nilai SAKIP Sekretariat	Nilai	79,5	79,5**	100%

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Nilai Akuntabilitas Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun dikeluarkan oleh Inspektorat Kementerian. Pada triwulan II tahun

2026 belum dapat diukur. Penilaian Mandiri berdasarkan aktivitas di setiap triwulan dapat menjadi rujukan dalam mengukur hasil akhir yang akan diperoleh pada tahun 2026. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan oleh Inspektorat No. PW.04.01/195/INS.M.EKON/11/2025 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa nilai AKIP Sekretariat berada pada nilai 78,95 dengan predikat BB. Maka besar kemungkinan target nilai 79,5 di akhir tahun 2026 dapat tercapai. Pada tahun 2025, implementasi akuntabilitas kinerja berada pada level "Sangat Baik" dengan interpretasi bahwa terdapat gambaran akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan bukan hanya di level Eselon I.

Tabel 6.1 Nilai LHE AKIP Sekretariat (Eselon I)

Evaluasi Per Komponen LHE 2025	LHE 2025	Target 2026
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Catatan : • Terdapat dokumen perencanaan yang belum ditetapkan dan dipublikasikan • Indikator – indikator kinerja yang ada masih belum memenuhi kriteria SMART-C • Rencana Aksi masih bersifat general • Belum tersusun dan ditetapkannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2025 secara formal oleh pejabat	26,61	26,78 (+0,17)
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Catatan : • Belum ada kebijakan terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja • Definisi dan cara mengukur indikator kinerja utama yang belum sesuai dengan Manual IKU • Manajemen data dukung yang belum Optimal • Belum terlaksananya pemantauan dan pengukuran capaian kinerja atas seluruh pegawai (Masih terdapat pegawai yang belum melaksanakan pengisian SKP) • Belum diimplementasikannya SOP Reward and Punishment • Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian kebijakan dan anggaran	22,40	22,55 (+0,15)
Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Catatan : • Belum dilaksanakannya reviu atas laporan kinerja triwulanan • Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat belum memuat kualitas keberhasilan atau kegagalan capaian target beserta Upaya dan hambatan • Kualitas penyajian laporan kinerja tahunan	15,01	15,08 (+0,07)
Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Catatan : • Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menyeluruh pada level eselon II (Inspektorat) • Dasar pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum didukung dengan Surat Tugas • Laporan Hasil Evaluasi Internal Sekretariat belum menjadi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya	14,93	15,09 (+0,16)

Nilai Total Evaluasi AKIP Final	78,95	79,5 (+0,55)
---------------------------------	-------	-----------------

Pada tahun 2026, Sekretariat menindaklanjuti Peraturan PermenPAN RB Nomor 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang mengamanahkan agar seluruh Kementerian menyesuaikan Pedoman Penilaian Kinerja. Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. KP .08.01/11/SES.M.EKON/12/2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian juga telah di tetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada level Eselon I dan II dengan cakupan tim pengarah dan tim pelaksana.

Laporan PKO tahun 2025 Sekretariat telah disusun, ditetapkan oleh Sesmenko dan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat memiliki capaian PKO yaitu 92,84 dengan predikat “Baik”, pada level eselon II nya Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memiliki capaian PKO yaitu 90,20 dengan predikat “Baik”.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Reformasi Birokrasi Tematik	84,01 6,76	80,65 7,74	95,28% 114,40%	95,28% 110%	10% -10%	95,75% 99%
2	Terwujudnya Dukungan Pengantian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Tingkat Input Material Sikular Pengeluaran Portofolio Laki-Laki dan Perempuan	9,2 L: 10.981b P: 9.920b	9,25* L: 10.981b* P: 9.920b*	100% 100%	100% 100%	10% -10%	90% 90%
3	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Diadopsikan	100%	100%	100%	100%	10%	90%
4	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional	Persentase Pemantauan Dokumen Penyusunan Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	10%	90%
5	Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	4 dari 4	120%	110%	10%	99%
6	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	85%	100%	120%	110%	10%	99%
Total Capaian PK (4)								742,78%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								92,84%
Predikat PKO (6)								Baik

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II Ta. 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

IKU. Nilai SAKIP Sekretariat			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan
1	Penyusunan laporan kinerja triwulan II di lingkungan Sekretariat	Tertunda/ Digeser	Bulan April 2026, Sekretariat Kementerian Perekonomian telah memenuhi permintaan penyusunan Laporan Kinerja triwulan II berdasarkan konsep laporan kinerja triwulanan yang telah dikonsepkan.

			Laporan kinerja triwulan II Sekretariat yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Pimpinan yang dilanjutkan dengan proses upload ke dalam Aplikasi Kinerja Ekon GO beserta dengan Data Dukung Kinerja di triwulan II (https://kinerja.ekon.go.id)
2	Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja triwulan II	Tertunda/ Digeser	Pengukuran capaian indikator kinerja telah dilaksanakan beriringan dengan penyusunan laporan kinerja triwulan II. Pengukuran dilaksanakan berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan pada Manual IKU.
3	Monitoring capaian NKO TW II	Tertunda/ Digeser	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan rerata dari hasil Nilai rata-rata Sasaran Strategis Hingga triwulan II, capaian Nilai Kinerja Organisasi masih dalam rentang terkendali.
4	Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan	Terlaksana	Optimalisasi aplikasi kinerja pada bagian pengukuran dilaksanakan dengan : (a) penyesuaian formulasi pada aplikasi kinerja; (b) otomatisasi perhitungan formulasi; dan (c) pemeriksaan kembali hasil pengukuran Pada sisi pelaporan dilakukan optimalisasi dengan cara menyempurnakan konsep laporan dan
5	Monitoring implementasi matriks indeks lanjut	Terlaksana	Monitoring implementasi matriks indeks lanjut telah dilaksanakan sesuai rencana dan terdokumentasi.
6	Pemenuhan bukti dukung AKIP Sekre	Terlaksana	Bukti dukung AKIP Sekretariat telah dipenuhi

			sesuai ketentuan dan jadwal pelaporan.
--	--	--	--

Upaya nyata dari seluruh kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Menyempurnakan Permenko Nomor 19/2022 tentang Pengelolaan Kinerja sebagai pedoman Teknis dalam Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja
2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Sekretariat yang meliputi Sasaran Target dan Sasaran Triwulan II
3. Melaksanakan *Kick Off Meeting* penyusunan laporan kinerja organisasi di seluruh unit kerja
4. Menyusun *cascading* kinerja dalam bentuk dokumen Matriks Peran Hasil, sehingga dapat terlihat keterhubungan kinerja dari level atas hingga level individu pada Sekretariat Kemenko Perekonomian.
5. Penyampaian laporan kinerja triwulan II 2026 kepada pimpinan untuk dapat ditetapkan dan diketahui sebagai bahan dasar pertimbangan kebijakan atau keputusan untuk periode berikutnya.
6. Melaksanakan penyesuaian anggaran (revisi anggaran)
7. Penyusunan Nota Dinas permintaan Laporan Narasi Evaluasi Manajemen Kinerja semester I tahun 2026.
8. Menyusun dan menetapkan Pohon kinerja di unit – unit kerja di lingkungan Kebiroan Sekretariat.
9. Entry Meeting Evaluasi AKIP Internal 2026
10. Pemenuhan bukti dukung evaluasi AKIP Internal 2026
11. Pemenuhan Evaluasi Manajemen Risiko di lingkup kesekretariatan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Melaksanakan benchmarking langsung kepada Inspektorat Kementerian terkait rekomendasi perbaikan yang telah disusun atas Laporan Evaluasi AKIP Eselon I Sekretariat
- Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada level entitas Sekretariat dan seluruh kebiroan di Lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di laksanakan di Kantor Kementerian Hal ini dapat menjadi bentuk Langkah efisiensi penghematan anggaran pelaksanaan penetapan Perjanjian Kinerja 2026;
- Pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola kinerja di unit kerja
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;
- Menggabungkan 2 (dua) tema kegiatan rapat ke dalam 1 (satu) kegiatan rapat ketika melaksanakan Konsinyering.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan II yaitu Rp. 58.212.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tingkat kepatuhan waktu pengumpulan laporan kinerja dan dokumen bukti dukung kinerja
2. Beberapa unit kerja terlambat dalam menyusun capaian Sasaran Kinerja Pegawai triwulan I
3. Terdapat indikator kinerja yang nilainya belum dapat diukur karena nilai akan keluar pada akhir tahun atau awal tahun periode berikutnya
4. Durasi yang singkat untuk pengumpulan dan pemenuhan bukti dukung evaluasi AKIP

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi sebelum menyusun laporan kinerja triwulanan dan mengingatkan kembali dalam bentuk reuiu laporan kinerja untuk dapat memperbaiki kualitas informasi laporan kinerja yang disusun
2. Menetapkan timeline waktu dan *follow up* berkala terkait pengumpulan laporan kinerja, bukti dukung kinerja, dan SKP pegawai
3. Melaksanakan penilaian mandiri atas kegiatan yang telah dilaksanakan, yang mendukung tercapainya target kinerja 2026.

Jakarta, Juli 2026
Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama



Heny Puspitasari